PERUBAHAN
RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
2021-2026

DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA BATAM

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang---------- 1

1.2 Landasan Hukum---------- 3

1.3 Maksud dan Tujuan ---------- 12

1.4 Sistematika Penulisan ---------- 13

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian---------- 15

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ---------- 30

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertania ---------- 32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ---------- 43

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ---------- 45

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil---------- 48

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ---------- 61

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ---------- 93

3.5 Penentuan isu-Isu Strategis---------- 127

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ---------- 173

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ---------- 173

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI ---------- 176

5.2. Arah Kebijakan---------- 177

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan---------- 178

6.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ---------- 179

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ---------- 180

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah---------- 182

BAB VIII. PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi ---------- 184

8.2. Kaidah Pelaksanaan---------- 184

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Susunan Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 30

Tabel 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 31

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2016-2020 34

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 2016-2021 37

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (terkait BKP) 72

Tabel 3.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan 74

Tabel 3.3 Arah Kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional Badan Ketahanan Pangan 2020-2024 75

Tabel 3.4 Program dan Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 77

Table. 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan 85

Tabel 3.6 Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 90

Tabel . 3.7 Pembagian Wilayah Administratif Kota Batam 97

Tabel 3.8 Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng 99

Tabel 3. 9 Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam 101

Tabel 3. 10 Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Batam 105

Tabel 3. 11 Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Batam 106

Tabel 3.12 Jenis, Risiko dan Potensi Bencana di Kota Batam
Berdasarkan Kasus 110

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kota Batam 114

Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Umur Tahun 2016-2020 .. 118

Tabel 3.15 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Tahun 2016-2020 119

Tabel 3.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut
Kecamatan Tahun 2021-2027 121

Tabel 3. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan
Tahun 2028-2034 121

Tabel 3. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan
Tahun 2035-2037 122

Tabel 3.19 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam *Quick Appraisal* .. 125

Tabel. 3.20 Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk yang Bekerja di
Sektor Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2021 128

Tabel 3.21. Daftar Perkembangan Harga Komoditi Sayuran di Kota
Batam Tahun 2021 129

Tabel.3.22 Produksi Tanaman Palawija di Kota Batam Tahun 2017 s.d 2020 . 130

Tabel. 3. 23. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Palawija di Kota Batam Tahun 2020 132

Tabel 3.24 Produksi Sayuran di Kota Batam Tahun 2017 s.d 2020 133

Tabel. 3.25 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran di Kota Batam Tahun 2020 134

Tabel 3.26. Jumlah BPP, WKPP dan PPL di Kota Batam Tahun 2021 138

Tabel 3.27.Jenis Kelompok Tani dan Rincian Berdasarkan Kelasnya di Kota Batam Tahun 2021 139

Tabel 3.28. Populasi dan Produksi Ternak Sapi, Kambing, Babi dan Ayam di Kota Batam Tahun 2021 140

Tabel 3.29. Perbandingan Angka Kebutuhan dan Ketersediaan Konsumsi sesuai Standar Norma Gizi Tahun 2021 141

Tabel 3. 30. Rata – rata Pemasukan Ternak dan Daging Sapi dari Luar Kota Batam (Luar Negeri (Import) dan Lokal) per Tahun . 142

Tabel 3.31 Jenis Penyakit Hewan Yang dilakukan surveilans dan Monitoring oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Bekerjasama dengan Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2021 145

Tabel 3.32 Jenis Pengujian Laboratorium pada Produk Asal Hewan yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam bekerjasama dengan Balai Veteriner Bukittinggi dan BPMSPH Bogor Tahun 2021 145

Tabel 3.33. Harga Komoditi Bidang Peternakan di Kota Batam 150

Tabel 3.34. Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH ketersediaan tahun 2021 159

Tabel.3.35 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2021 (ATAP 2021) 160

Tabel 3.36Metode dan parameter pengujian sampel. 168

Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam
Tahun 2021-2026 175

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 178

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026 183
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 185

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan merupakan wujud perencanaan tugas pokok, fungsi, dan kebijakan selama 5 tahun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021 – 2026 yaitu **"TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA".**

Rencana Stategis ini menjadi acuan segenap satuan kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tugas membangun sektor Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kota Batam.

Batam, 01 Nopember 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

MARDANIS, SE, MH
NIP. 19680714 198811 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dilakukan untuk menindaklanjuti dan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terhadap penetapan Renstra PD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui sebagai berikut :

a) Tahapan persiapan penyusunan Perubahan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi.
b) Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.
c) Tahapan penetapan Renstra SKPD
d) Perubahan Renstra SKPD

Perubahahan Rencana Strategi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam untuk periode Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Penyusunan Rencana Strategi Kinerja Perangkat Daerah (RENSTRA PD) ini merupakan dari himpunan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga ke tingkat Kota Batam.

Perubahan Rencana Strategi Kinerja Perangkat Daerah sangat diperlukan sebagai pedoman dan acuan dalam menentukan rencana pembangunan, khususnya di sektor ketahanan pangan, kelembagaan penyuluh, pertanian, serta peternakan dan kesehatan hewan Kota Batam guna mendukung salah satu dari Misi Walikota Batam 2021-2026, Adapun Misi Walikota untuk 5 (lima) Tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026, merupakan acuan dalam Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, Kelembagaan dan Penyuluh, Pertanian, serta Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam secara prioritas dan kontinuitas pelaksanaan program dalam jangka waktu lima (5) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Renstra OPD Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diu bah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
10. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; juncto UU No : 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
24. Peraturan Menteri Pertanian No. 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang RPJPD Kota Batam Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kota;
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 44);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Restribusi Jasa Umum, Restribusi Jasa Usaha dan Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran daerah Kota Batam Tahun 2013, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;

39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

40. Peraturan Walikota Batam Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;

41. Peraturan Walikota Batam Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Disusunnya Renstra OPD dimaksudkan sebagai wujud amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional untuk mewujudkan dukungan terhadap Visi dan Misi Walikota Batam, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kota serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Penyusunan Renstra PD ini juga sebagai arah dan alat untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah, mengoptimalkan peran serta masyarakat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta terciptanya konsistensi pembangunan yang terintegrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah, propinsi dan pusat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan PD dalam jangka waktu lima (5) tahun kedepan.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian target indikator program dan kegiatan serta perencanaan penganggaran PD yang mendukung Misi Walikota Batam lima tahun yang akan datang.

3. Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dalam memahami dan mensinergikan dengan arah kebijakan dan program prioritas

4. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan khususnya bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluh, pertanian serta peternakan dan kesehatan hewan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

Berisi tentang peran OPD dalam menjalankan tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, menjelaskan telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjelaskan telaahan Renstra K/L dan Provinsi serta telaahan RTRW dan kajian

lingkungan hidup strategis serta isu-isu strategis dan kondisi umum bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluh, pertanian serta peternakan dan kesehatan hewan yang berkaitan dengan kondisi produksi, pengembangan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susuanan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kota Batam, antara lain :

- Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah sesuai dengan kewenangannya

A. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; dan
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

B. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas

1. Menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, kelembagaan dan Penyuluhan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
4. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai peraturan perundangundangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
6. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Rencana strategis dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai peraturan perundangundangan;

7. Menetapkan penyusunan data dan informasi, bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
9. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
11. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas; l
12. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah;

13. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah;
14. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para Kepala Bidang.
15. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
16. Menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
17. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
18. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
19. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
20. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di bidang

A. Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan asset;
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

B. Sekretaris mempunyai uraian tugas

1. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
4. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
6. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
7. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Ketahanan Pangan dan Pertanian yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Rencana strategis dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai peraturan perundangundangan.
8. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

9. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
10. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
11. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup Dinas;
12. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
13. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
14. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
15. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
16. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bidang Ketahanan pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang yang meliputi pembinaan, pengendalian, pendataan, penanganan,

pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang ketahanan pangan.

A. Pangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program lingkup ketahanan pangan;
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup ketahanan pangan;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup ketahanan pangan; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketahanan pangan.

B. Pangan mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
3. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Ketahanan Pangan;
4. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
6. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Ketahanan Pangan;

7. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan; dan
9. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bidang Kelembagaan dan Penyuluh mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang yang meliputi pembinaan, pengendalian, pendataan, penanganan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang kelembagaan dan penyuluh.

A. Penyuluh mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program lingkup kelembagaan dan penyuluh;
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kelembagaan dan penyuluh;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup kelembagaan dan penyuluh; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan dan penyuluh.

B. Penyuluh mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Kelembagaan dan Penyuluh yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Kelembagaan dan Penyuluh;
3. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Kelembagaan dan Penyuluh;
4. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Melaksanaan pendataan, pembinaan, pengembangan dan penilaian kelembagaan dan penyuluh;
6. Merumuskan, menetapkan dan mengembangkan programa penyuluhan;
7. Melaksanakan forum petani, peternak dan menyajikan data informasi penyuluhan;
8. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Kelembagaan dan Penyuluh;
10. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Kelembagaan dan Penyuluh; dan

12. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang yang meliputi pembinaan, pengendalian, pendataan, penanganan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pertanian;

A. Pertanian mempunyai fungsi

1. Penyusunan rencana dan program lingkup pertanian;
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pertanian;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup pertanian; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pertanian

B. Pertanian mempunyai uraian tugas

1. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pertanian yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pertanian;
3. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pertanian;
4. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Melaksanakan Pembinaan dan pelayanan usaha di Bidang Pertanian;

6. Melaksanakan pengadaan dan penyaluran benih dan bibit bermutu;
7. Menetapkan pedoman pengembangan benih dan bibit;
8. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pertanian;
10. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pertanian; dan
12. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang yang meliputi pembinaan, pengendalian, pendataan, penanganan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

  A. Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program lingkup peternakan dan kesehatan hewan;

2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
3. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup peternakan dan kesehatan hewan; dan
4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peternakan dan kesehatan hewan.

Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
6. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
10. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

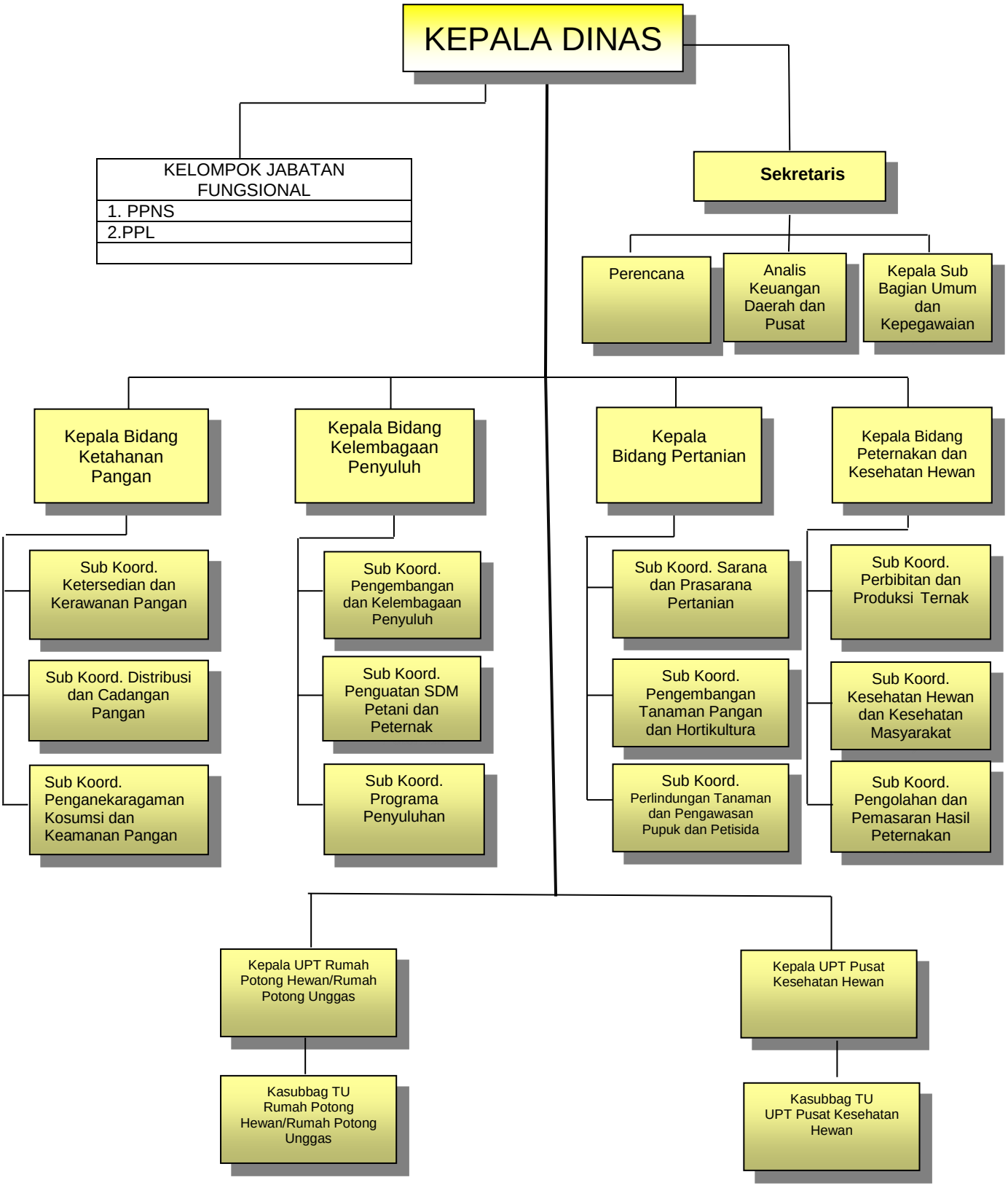

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Susunan Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Susunan Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Pangkat/Gol		Eselon		Pendidikan		Diklat Penjenjangan		Agama		Jenis Kepegawaian	
Pembina utama muda (IV/c)	1	II b	1	SD	0	LPJ	36	Islam	30	Struktural	16
Pembina Tk. I (IV/b)	2	III a	1	SLTP	0	Diklatpim IV	15	Protestan	4	FungsionaL	20
Pembina (IV/a)	4	III b	4	SLTA	2	Diklatpim III	3	Katholik	0	PPPK	4
Penata Tk. I (III/d)	12	IVa	3	DII	0			Hindu	0		
Penata (III/c)	7	IVb	2	DIII	4			Budha	0		
Penata Muda Tk. I (III/b)	4			S1	20						
Penata Muda (III/a)	2			S2	8						
Pengatur Tk. I (II/d)	2			S3	0						
Pengatur (II/c)	0										
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0										
Pengatur Muda (II/a)	1										

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai. Analisa kebutuhan dan aktual pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Batam PNS sebanyak 36 Orang dan Pegawai Pemerintah Perjanjian kerja sebanyak 4 Orang Total Pegawai sebanyak 40 sedangkan kebutuhan sebanyak 97 rincian sebagai berikut:

	Kebutuhan	Aktual
Eselon II	1	1
Eselon III	5	5
Eselon IV	19	3
Pelaksana	46	7
Fungsional	26	24
Total	**97**	**40**

Dari data diatas dapat kita tarik kesimpulan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tidak sesuai dengan kebutuhan karena kekurangan pegawai 57 orang.

Sarana dan prasarana perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

No	Nama Barang	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
4	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1
5	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1
6	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1
7	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1
8	A.C. Split	17
9	Alat Kedokteran Lainnya	2
10	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2
11	Alat Panen Lainnya	1
12	Alat Pencabut Bulu Ayam	3
13	Alat Penghancur Kertas	1
14	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya	3
15	Alat Procesing rumput	5
16	Filing Cabinet Besi	7
17	Genset	1
18	Heating Set	3
19	Global Positioning System	3
20	Hoist	2

21	Jeep	1
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	22
No	**Nama Barang**	**Jumlah**
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
25	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
26	Lap Top	10
27	Lemari Besi/Metal	6
28	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10
29	Lemari Es	2
30	Lemari Kayu	5
31	Meja 1/2 Biro	15
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13
33	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6
36	Meja Rapat	4
37	P.C Unit	16
38	Station Wagon	1
39	Sepeda Motor	26
40	Rak Besi	6
41	Mesin Fotocopy Folio	1
42	Mesin Absensi	1
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15
44	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
45	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
46	Sedan	1
47	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	5
48	Tractor lainnya	1
49	Tractor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya)	1

Dari tabel diatas secara Quantitas Kualitas masih belum memadai khususnya sarana prasarana yang mendukung dalam bidang teknologi, informasi dan penginputan data untuk dinas.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah : **(1) Urusan Wajib** terdiri dari Urusan Ketahanan Pangan dan **(2) Urusan Pilihan** terdiri dari Urusan Pertanian dan Peternakan.

Wilayah Batam dengan letak geografis yang sangat strategis berhadapan langsung dengan Singapura sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, sejak pemerintahan Orde Baru wilayah Batam sudah dikembangkan menjadi kawasan industri yang bertumbuh dengan pesat, diharapkan dapat mendorong pembangunan serta menjadi mesin perekonomian nasional.

Dengan Visi Kota Batam yaitu **"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat"**. Maka peranan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dituntut untuk menyelaraskan tuntutan pembangunan secara umum dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak serta memenuhi kebutuhan penduduk Batam akan hasil pertanian yang dirasa semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Batam pertahun yang cukup signifikan.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan		**19.015 Ton**	**19.025 Ton**	**19.338 Ton**	**19.841 Ton**	**20.345 Ton**	**19.015 Ton**	**68,721.08Ton**	**54,956.44Ton**	**49,522.80 Ton**	63,158.23 ton	100%	100	100.0	100.0	100.0
	Jumlah Keluarga Pertani Budidaya Pertanian		180 Keluarga Petani	40 KK	40 KK	40 KK	40 KK	180 Keluarga Petani	71 KK	69 KK	20 KK	190 KK	100%	56	172.5	50	
	Persentase Wilayah Pengawasan Produk Pertanian serta Peredaran dan Penggunaan Pestisida dan Pupuk		30%	35%	40%	45%	50%	30%	35%				100%				
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian		30%	40%	45%	50%	55%	30%	40%			45%	100%				
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian					50%	55%										
	Pelaksanaan Peda Penas		2 kali	1 kali			1 Kali	2 kali	1 Kali				100%	100			
	Persentase Pembentukan Kawasan Terpadu Pertanian		0	20%	40%	50%		0	20%	40%			100%	100	100		
	Tersedianya Sumber-sumber Air (Embung) di daerah Hinterland dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan		-	-	6 Unit	6 Unit	6 Unit	-		4 Unit	1 Unit			66.7	67	16.66667	
	Produksi dan Populasi Ternak di Kota Batam		483 Ekor	12 eKor	14 eKor	50 Ekor	50 Ekor	483 Ekor	12 eKor	26 Ekor	19 Ekor	6 Ekor	100%	100	185.7	38	12
	Terlaksananya Peningkatan SDM Penyuluh Lapangan Pertanian, Petani dan Peternak		6 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	6 Kali	2 Kali		2 Kali	0	100%	100	100	100	
	Jumlah Kelompok Petani dan Peternak yang Terbina		3 Kelompok	8 Kelompok	13 Kelompok	17 Kelompok	21 Kelompok	3 Kelompok	5 Kelompok			0	100%	62.5	0		
	Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan		3 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	3 Kelompok	4 Kelompok				100%	100	0		
	Persentase Penyusunan Programa Penyuluh dan Sistem Informasi Penyuluhan Kota Batam		0%		40%	60%	80%	0%						0	0		

	Persentase Peningkatan Pembangunan RPH, RPU dan Pukeswan		60%	70%	72%	0%	0%	60%						0	0		
	Persentase Peningkatan Pembangunan dan penyediaan sarana pendukung RPH, RPU dan Pukeswan		70%	0%	72%	74%	76%	70%	70%	72%	74%		100%	72	100		
	Cakupan Wilayah Pengawasan, Pencegahan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor Peternakan		30%	35%	40%	45%	50%	30%	35%	40%	45%	50	100%	100	100		
	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan, Pemotongan Unggas dan Ruminansia		50%	55%	55%		70%	50%				70%					
	Persentase Pemotongan Unggas dan Ruminansia		50%			65%	70%	50%				70%					
	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan		50%			65%	70%	50%									
	Persentase Ketersediaan Pangan		30%	30%	32%	34%	36%	30%	30%	32%	34%		100%	100			
	Skor PPH		0	89.9	91.9	93.9	94.05	0%	88.50	86.50	91.30	92.2		98.44	94.12	97.23	98.03
	Cakupan Wilayah Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi		Kota Batam	Kota Batam	Kota Batam	Kota Batam	Kota Batam	Kota Batam	Kota Batam	Kota Batam	Kota Batam	Kota Batam	100%	100	100		
	Jumlah Lokasi Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan		2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi				100%	300			
	Tersedianya cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat yang terkena rentan pangan				25 Ton	30 Ton	35 Ton										
	Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan					2 Dokumen											
	Dokumen Ketersediaan dan Pola Konsumsi Pangan				1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen										
	Dokumen Pola Pemantauan dan analisis sistem distribusi pangan serta akses pangan masyarakat				2 Dokume	1	1 Dokumen										

	Jumlah Peningkatan Kelompok Agribisnis Pertanian Sektor Unggulan		8 Klp	4 Klp	10 Klp	10 Klp	10 Klp	8 Klp	4 KWT	10 Klp			100%	100	100	100	100
	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran		70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran		70%				90%	70%				90%					
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran		70%				90%	70%				90%					

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
2016-2021

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan		**2,447,733,180**	7,261,183,200	9,497,301,520	10,127,712,054		**1,843,633,480**	2,403,852,540	1,615,008,200			75.3	33.1	17.0			
Jumlah Keluarga Pertani Budidaya Pertanian		100,090,000	250,000,000	250,000,000	275,000,000		90,360,000.00	202,220,000	160,000,000	3,813,711,000		90.3	80.9	64.0	1,386.8		
Persentase Wilayah Pengawasan Produk Pertanian serta Peredaran dan Penggunaan Pestisida dan Pupuk		51,740,000	56,914,000	62,605,400	68,865,940		51,740,000.00					100.0	-	-	-		
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian		193,520,000	212,872,000	234,159,200	257,575,120		188,464,600.00			643,900,000.00		97.4	-	-	250.0		
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian				1,000,000,000	1,100,000,000									-	-		
Pelaksanaan Peda Penas		129,696,000	-	-	142,665,600		128,046,000.00					98.7			-		
Persentase Pembentukan Kawasan Terpadu Pertanian		279,478,000	307,425,800	338,168,380			259,478,000.00	622435000.4				92.8	202.5	-			
Tersedianya Sumber-sumber Air (Embung) di daerah Hinterland dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan		-	900,000,000	900,000,000	900,000,000			642880000	169000000				71.4	18.8	-		
Produksi dan Populasi Ternak di Kota Batam		160,061,500	250,000,000	900,000,000	990,000,000		157,285,500.00	431212000	269917200	100,990,500.00		98.3	172.5	30.0	10.2		
Terlaksananya Peningkatan SDM Penyuluh Lapangan Pertanian, Petani dan Peternak		106,379,000	117,016,900	128,718,590	141,590,449		98,995,000.00	540	25480000			93.1	0.0	19.8	-		
Jumlah Kelompok Petani dan Peternak yang Terbina		165,040,000	181,544,000	199,698,400	219,668,240		140,440,000.00					85.1	-	-	-		
Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan		118,555,000	130,410,500	143,451,550	157,796,705		117,870,000.00					99.4	-	-	-		
Persentase Penyusunan Programa Penyuluh dan Sistem Informasi Penyuluhan Kota Batam			75,000,000	82,500,000	90,750,000								-	-	-		

Persentase Peningkatan Pembangunan RPH, RPU dan Pukeswan		769,067,380	500,000,000	550,000,000	605,000,000							-	-	-	-		
Persentase Peningkatan Pembangunan dan penyediaan sarana pendukung RPH, RPU dan Pukeswan		-	4,000,000,000	4,400,000,000	4,840,000,000		498,714,380.00	464120000	937361000				11.6	21.3	-		
Cakupan Wilayah Pengawasan, Pencegahan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor Peternakan		150,000,000	130,000,000	143,000,000	157,300,000		112,240,000.00	40985000	53250000	43,690,000.00		74.8	31.5	37.2	27.8		
Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan, Pemotongan Unggas dan Ruminansia		224,106,300	150,000,000									-	-				
Persentase Pemotongan Unggas dan Ruminansia				82,500,000	90,750,000					123,147,114.00				-	135.7		
Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan				82,500,000	90,750,000					80,204,260.00				-	88.4		
Persentase Ketersediaan Pangan		**1,086,966,000**	1,595,684,000	1,905,252,400	1,930,777,640		**1,007,610,000**	535384113	488285250	201.429.900,00		92.7	33.6	25.6			
Cakupan Wilayah Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan		479,271,000	400,000,000	440,000,000	484,000,000		441,780,000.00	401414513	488285250			92.2	100.4	111.0	-		
Jumlah Lokasi Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan		475,255,000	450,000,000	495,000,000	544,500,000		446,755,000.00					94.0	-	-	-		
Tersedianya cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat yang terkena rentan pangan			300,000,000	330,000,000	363,000,000									-	-		
Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				150,000,000										-			
Dokumen Ketersediaan dan Pola Konsumsi Pangan			150,000,000	165,000,000	181,500,000									-	-		
Dokumen Pola Pemantauan dan analisis sistem distribusi pangan serta akses pangan masyarakat juga terwujudnya pemantauan dan analisis harga pangan			150,000,000	165,000,000	181,500,000								-	-	-		
Jumlah Peningkatan Kelompok Agribisnis Pertanian Sektor Unggulan		132,440,000	145,684,000	160,252,400	176,277,640		119,075,000.00	133969600				89.9	92.0	-	-		
		2,371,757,220	2,608,932,942	2,869,826,236	3,156,808,860		**2,368,640,920**	1,471,950,775	1566173684	1,238,349,431		99.9	56.4	54.6	39.2		
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran		2,371,757,220	2,608,932,942	2,869,826,236	3,156,808,860		2,368,640,920.00	1,471,950,775	1566173684	1,238,349,431		99.9	56.4	54.6	39.2		
		320,460,000	352,506,000	387,756,600	426,532,260		**516,344,700**	112,840,000	54419400	14,888,000		161.1	32.0	14.0	3.5		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran		320,460,000	352,506,000	387,756,600	213,266,130		516,344,700.00	112,840,000	54419400	14,888,000		161.1	32.0	14.0	7.0		
		6,226,916,400	**11,818,306,142**	**14,660,136,756**	**15,641,830,814**		**5,736,229,100**	**4,524,027,428**	**3,723,886,534**			92.1	38.3	25.401	-		

2.3.1 Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Kota Batam sebagai lembaga penyelenggara urusan Pemerintahan Kota di bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi sebagai inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Batam sesuai arah kebijakan, strategis dan sasaran ketahanan pangan nasional. Sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan.

Ada tiga pilar yang mendukung ketahanan pangan :

1. Ketersediaan pangan yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi, cadangan maupun impor dan ekspor.
2. Distribusi yang mencakup aksesabilitas pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan strategis.
3. Konsumsi yang mencakup jumlah mutu gizi/nutrisi, keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di daerah, diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang selama ini menjadi acuan, perlu ditinjau kembali agar substansi pengaturannya dapat diperluas sesuai amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal, dan penanganan rawan pangan pada masyarakat miskin.

2.3.2. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh

Kelembagaan dan Penyuluh merupakan wadah dan organisasi pengembangan sumber daya manusia pertanian serta menyelenggaraan kegiatan penyuluhan, karena untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adanya kelembagaan penyuluhan pertanian diharapkan dapat menjamin terselenggaranya ;

a. Fungsi perencanaan dan penyusunan program penyuluhan di tingkat Kabupaten Kota dan tersusunnya programa di tingkat BPP (Balai Penyuluhan Pertanian).
b. Fungsi penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, model usaha argobisnis dan pasar bagi petani
c. Fungsi pengembangan SDM pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan.
d. Penataan administrasi dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian berdasarkan kompetensi dan profesionalisme.
e. Kegiatan partisipasi petani penyuluh dan peneliti.
f. Fungsi supervise, monitoring, evaluasi serta umpan balik yang positif bagi perencanaan penyuluhan kedepan.

Sasaran utama penyuluhan pertanian meliputi petani dan peternak, baik individu maupun kelompok dan pelaku usaha lainnya. Kelompok tani sebagai

salah satu pelaku pembangunan pertanian terbentuk berdasarkan keakraban dan keserasian serta kebersamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di Kota Batam, jumlah kelompok tani sampai dengan tahun 2016 sebanyak 82 kelompok.

2.3.3. Bidang Pertanian

Pembangunan hortikultura telah memberikan sumbangan yang berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional, yang dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumber pendapatan dari subsektor hortikultura, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan hortikultura juga meningkatkan nilai dan volume perdagangan internasional atas produk hortikultura nasional dan ketersediaan sumber pangan masyarakat. Kontribusi sub sektor hortikultura ke depan akan dapat lebih ditingkatkan melalui peningkatan peran dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, bersinergi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kota Batam bukan merupakan kota yang dikembangkan menjadi Kota yang berbasis pada pertanian, namun peranan disektor ini sangat menentukan dalam penyediaan akan hasil pertanian sebagai kebutuhan pokok dari masyarakat yang ada di Kota Batam. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan solusi terhadap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh petani. Kebutuhan akan sayuran dikota Batam sangat tinggi 79.200 ton /bulan, yang baru bisa dipenuhi oleh petani kota Batam 31,7 % dari kebutuhan (25.095 ton / tahun) , kekurangannya didatangkan dari luar Batam.

2.3.4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kota Batam bukan merupakan daerah yang dikembangkan sebagai sentra produksi peternakan, namun kebutuhan akan protein hewani sangat penting bagi masyarakat Kota Batam mengingat Kota Batam yang berpenduduk 1.196.396 jiwa (data Juni 2020 BPS Kota Batam) sangat membutuhkan Pangan Asal Hewan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Kota Batam. Populasi ternak di Kota Batam cukup fluktuatif jumlahnya, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat perkembangannya begitu dinamis terkait dengan faktor kelahiran, kematian, pemotongan, pemasukan dari luar daerah, dan pengeluaran dari Kota Batam

Ketersediaan produksi hasil ternak berupa daging dan telur, belum mampu memenuhi angka kebutuhan konsumsi sesuai standar norma gizi, kecuali untuk produksi daging ayam, tingkat produksi sudah memenuhi kebutuhan konsumsi. Sementara ini, kebutuhan daging sapi masih dipenuhi dari luar Kota Batam dan daging impor beku dari luar negeri, sedangkan kebutuhan telur disuplai dari luar Kota Batam dan baru sebagian kecil dari Batam.

Kota Batam termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari wilayah / daerah lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar provinsi dengan adanya bandar udara dan pelabuhan laut sebagai pintu masuk hewan ternak dan atau produk asal hewan / produk pangan asal hewan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari luar Kota Batam. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam bekerjasama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam melaksanakan fungsi

pengawasan lalu lintas hewan/ternak dan produk asal hewan dari dan keluar Kota Batam.

Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dalam hal ini penyakit menular pada Hewan seperti Flu Burung / AI (Avian Influenza), Flu Babi, PMK dan Menular Hewan lainnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, RTRW Kota Batam dan KLHS Kota Batam bahwa tantangan dan peluang pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam secara umum merupakan bagian dari tantangan dan peluang yang dihadapi oleh provinsi maupun nasional, yaitu ;

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menjadikan kebutuhan pangan semakin tinggi.

2. Supply and demand komoditas pangan yang belum berimbang, sehingga terjadi ketergantungan pasokan pangan yang tinggi dari luar daerah dan luar negeri.
3. Penggunaan pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pangan yang berpengaruh terhadap keamanan pangan.
4. Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat konversi lahan yang mengancam keberlanjutan produksi pangan.
5. RTRW Kota Batam lebih di peruntukan Perindustian dan Prawisata.
6. Perubahan iklim ekstrim dan dinamika ekonomi di tingkat global, regional, maupun nasional dan serangan hama yang dapat berpengaruh terhadap penyediaan pangan.
7. Produktivitas dan profitabilitas yang rendah akibat pemanfaatan teknologi, manajemen usahatani, dan pemasaran hasil pertanian yang kurang.
8. Sarana dan Prasarana Pertanian yang kurang memadai.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Adanya potensi pertanian yang belum dikembangkan.
3. Posisi Pulau Batam yang strategis sehingga menjadi peluang pangsa pasar petani maupun Peternak.
4. Penggunaan Lahan Tidur / Pekarangan untuk Program Pemberdayaan Perempuan dengan Program Pekarangan Pangan Lestari
5. Penggunaan Aplikasi Elektronik untuk menunjang kegiatan Pemasaran Produksi Pertania dan peternakan sert Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota Batam

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Isu strategis yang dihadapi di Indonesia juga terjadi di Kota Batam, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan. Isu-isu strategis tersebut antara lain laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, legalitas lahan pertanian, Regulasi/Kelembagaan, terbatasnya infrastuktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung pada beras. Tidak sebandingnya hasil produksi pertanian dan peternakan dengan jumlah penduduk Kota Batam sehingga diperlukan Peningkatkan hasil pertanian dan peternakan dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada (Intensifikasi Pertanian) dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara memeperluas lahan pertanian dan peternakan yang sebelumnya di manfaatkan sebagai lahan pertanian (Ekstensifikasi Pertanian). Untuk melakukan intensifikasi Pertanian dan Peternakan perlu dilakukan penguatan kelompok petani dan peternakan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian melalui pembinaan dan sosialisasi tentang teknologi budidaya pertanian dan peternak Serta pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian dan peternakan. Ekstensifikasi Pertanian perlu melakukan pemusatan kawasan lahan pertanian dan peternakan terpadu.

Di bidang ketahanan pangan Kota Batam bukan merupakan daerah produksi sehingga sangat rentan ketersediaan pangan oleh karena itu perlu dilakukan analisis ketersediaan, distribusi, konsumsi dan harga pangan untuk menentukan dan merumuskan

kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kota Batam.

3.1.1 Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan antara lain :

- Program ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang belum terintegrasi dengan baik.
- Belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang menghambat akses fisik dan memicu kenaikan harga.
- Ketersediaan Pangan , antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
- Sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien,
- Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi.
- hasil produksi pangan belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk
- Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi penganekaragaman pangan dan keamanan pangan

3.1.2 Permasalahan Bidang Kelembagaan dan Penyuluh

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Penyuluh :

- Kurangnya SDM Penyuluh lapangan untuk pertanian dan peternakan
- Terbatasnya sarana pendukung sistem penyuluhan,
- Keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani
- Rendahnya pengetahuan/ pemahaman petani dan peternak tentang budidaya tanaman
- Lambatnya dan sukarnya Aplikasi dalam pengajuan, pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi ke lokasi sentra produksi.

3.1.3 Permasalahan Bidang Pertanian dan Peternakan :

- Ketidakpastian status lahan yang dikelola terutama di kawasan Bonded Area.
- Rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan karena teknologi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil masih belum optimal.
- Sebagai penyangga ketahanan pangan Kota Batam, status lahan yang belum jelas untuk pengembangan budidaya pertanian / peternakan sangat berpengaruh terhadap penataan usaha pertanian / peternakan.
- Belum maksimalnya pelayanan dan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Rumah Potong Hewan (RPH).
- Belum maksimalnya pengawasan Pertanian dan Peternakan
- Masih kurangnya SDM petugas Pertanian dan Peternakan.
- Masih kurangnya pemanfaatan pulau-pulau / wilayah pesisir Kota Batam sebagai diversifikasi usaha peternakan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu "Bandar Dunia", "Madani", "Modern" dan "Sejahtera". Pokok visi "Bandar Dunia", "Madani", dan "Sejahtera" menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi "Modern" menunjukkan penekanan cara atau 'bagaimana' untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari keempat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

a. "Bandar Dunia" mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence".

b. "Madani" bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.

c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.

d. “Modern” mengandung makna sebagaisikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong pentahelix pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi “TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang

dapat dimanfaatkan sebagi tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "center of excellence" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta centre of excellence di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya

daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera" sekaligus "Bandar Dunia". Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang "sejahtera" akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi"Madani", yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas

merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Misi yang erat kaitannya dengan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota batam adalah misi **Ke 3 Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.** Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dilaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang bersentuhan langsung sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pembangunan Kota Batam dalam jangka waktu 5 (lima) mendatang. Tujuan dirumuskan atau diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kota Batam yang telah ditetapkan. Satu atau lebih tujuan ditetapkan untuk mewujudkan suatu misi. Tujuan ini juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi pembangunan Kota Batam dalam lima tahun mendatang. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kota Batam yang diperoleh dari pencapaian outcome program pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan, yaitu lima tahun mendatang.

Tujuan pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan Kota Batam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing. Tujuan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan misi pertama, yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang mantap tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, khususnya pada sektor-sektor ekonomi unggulan.
2. Tujuan pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan Kota Batam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing. Tujuan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan misi pertama, yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang mantap tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, khususnya pada sektor-sektor ekonomi unggulan
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi kedua. Cakupan tujuan ini meliputi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan perkotaan serta permukiman, penataan ruang kota dan peningkatan kualitas lingkungan. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan yang relatif tinggi dan meningkat/stabil dari tahun ke tahun. Mengingat cakupan infrastruktur di tujuan ini difokuskan ke wilayah perkotaan (Mainland), maka indikator tujuan secara eksplisit menyebutkan wilayah Perkotaan.

4. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi ketiga, yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Cakupan tujuan ini meliputi upaya meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta urusan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Upaya lain dalam mencapai tujuan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan, karena kemiskinan identik dengan kualitas hidup masyarakat yang rendah. Karenanya, ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang semakin meningkat serta Persentase Penduduk Miskin yang menurun dan relatif rendah dari tahun ke tahun.
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi ke empat. Cakupan tujuan ini meliputi percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan serta permukiman di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah nilai Indeks Infrastruktur wilayah hinterland yang relatif tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerataan pembangunan antara wilayah Perkotaan (mainland) dengan hinterland juga dapat tercermin dari kesenjangan antara nilai indeksinfrastruktur wilayah kedua wilayah yang semakin menurun setiap tahunnya.
6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi kelima pembangunan Kota Batam lima tahun mendatang. Cakupan tujuan ini meliputi berbagai upaya reformasi birokrasi melalui pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang baik, peningkatan kemandirian

keuangan daerah, serta pelayanan publik yang prima dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ukuran keberhasilan tujuan ke enam ini adalah indeks reformasi birokrasi yang relatif tinggi dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sub sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran, namun bukan perdagangan mobil dan sepeda motor. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan sub sektor pendukung pariwisata di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sub sektor yang dimaksud meliputi sub sektor akomodasi, makanan dan minuman. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan realisasi investasi daerah, baik yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
4. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian

daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan omset industri kecil dan menengah di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

5. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan omset koperasi dan usaha mikro di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
6. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya. Ukuran dari ketercapaian sasaran ini adalah nilai tukar nelayan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
7. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan kawasan atau kluster ekonomi kreatif di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
8. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi

pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan persentase pengelolaan sampah yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
10. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan, serta Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
11. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Pengetahuan serta Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
12. Meningkatnya aksebilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kesehatan masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran

ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

13. Meningkatnya daya beli masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Tingkat DayaBeli (Purchasing Power Parity) masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
14. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan. Terdapat dua ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender dan Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan. Nilai kedua ukuran/indikator tersebut diharapkan meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
15. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan berbagai potensi konflik maupun pelanggaran di Kota Batam dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kelima yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
16. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Skor Pola Pangan Harapan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keenam yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
17. Menurunnya angka pengangguran. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam yang menurun dari tahun ke tahun.

Sasaran ini merupakan kondisi ketujuh yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

18. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Batam dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedelapan yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
19. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
20. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
21. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
22. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang

efektif, efisien dan berkualitas. Terdapat empat ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kota Batam, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam, Nilai Tata Kelola Kearsipan, dan Tingkat Maturitas Satuan Pengawas Internal Pemerintahan (SPIP) Kota Batam. Ketercapaian sasaran tercermin dari status atau nilai yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

23. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
24. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terdapat tiga ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketercapaian sasaran tercermin dari nilai ukuran/indikator yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Renstra Kementrian Pertanian

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

1. **Pembangunan SDM**

   Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur**

   Melanjutkan pembangunan infrstruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan,

nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

A. TUJUAN

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :
    - **a.** Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
    - **b.** Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024),
    - **c.** Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/ hari hingga tahun 2024,
    - **d.** Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
    - **e.** Prevalence of Under-nourishment/ P o U (P r e v a l e n s i Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
    - **f.** Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan

Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024),

g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024),

h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),

i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),

j. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator :

    a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024),

    b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),

    c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),

    d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),

    e. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator:

    a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th. 2024),

b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja :

1. peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri

SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja :

2. pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional

3. persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan

SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja :

4. persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional

5. persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan

SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja

6. persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan

7. teknologi yang diterapkan oleh pertanian

SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja :

8. indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan

9. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan

SS6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja :

10. persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani

11. persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis

12. persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)

SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :

13. persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

14. persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian

SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :

15. nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :

16. nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja sasaran strategis di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan

pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian dengan targetnya dijelaskan dalam Target Kinerja (Bab IV) Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Indikator Strategis sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan (secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra).

C. PERMASALAHAN

Permasalahan Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi Berdasarkan data dan proyeksi pertumbuhan Penduduk 2015-2045, diperkirakan pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318,96 juta atau tumbuh 24.80% (63,37 Juta Jiwa) dari 2015. Sektor pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh penduduk Indonesia sepanjang waktu sebagai syarat dasar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja nasional.
2. Defisit Perdagangan Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Karakteristik usaha pertanian di Indonesia adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non tariff barier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing

produkproduk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya beli konsumen pada 24 Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024 saat terjadinya krisis ekonomi dalam skala global.

3. Status dan Luas Kepemilikan Lahan Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi pangan turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024 perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.
4. Pendidikan dan Usia Petani Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dari sisi usia petani, diketahui

bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

5. Kemiskinan Perdesaan Pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melalui ekspor, juga sebagai faktor utama pertumbuhan wilayah perdesaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan. Berdasarkan data BPS (2018), penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan.
6. Dampak Disrupsi Revolusi Industri 4.0 Perubahan dunia yang begitu cepat dengan berkembangnya inovasi dan teknologi mendorong revolusi baru yang disebut revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan mesinmesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Semua itu mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri termasuk industri pertanian. Di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

7. Dampak Perubahan Iklim (DPI) Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.
8. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering 34 Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024 dikeluhkan oleh petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. Di sisi lain lembaga pembiayaaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (high risk), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

3.3.2 Renstra Badan Ketahanan Pangan Nasional

Badan Ketahanan Pangan mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi,

merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

B. Tujuan Badan Ketahanan Pangan

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan Kementerian Pertanian, kontribusi BKP pada Tujuan 1 "Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan" dan Tujuan 3 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian" . Kedua tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih detil ke dalam Sasaran Program. Lebih rinci mengenai Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan akan dijelaskan lebih lanjut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (terkait BKP)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	
			2020	2024
1	Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	1 Global Food Security Index/GFSI	62.6	69.8
		2 Skor Pola Pangan Harapan	90.4	95.2
		3 Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/kapita/hari)	2.1	2.1
		4 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gr/kapita/hari)	57	57
		5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalensi of Undernourishment/ PoU (%)	6.2	5

		6	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5.2	4
		7	Ketersediaan Beras (Juta ton)	39.2	46.8
		8	Ketersediaan protein hewani (Juta ton)	2.5	2.9
		9	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% penerima BPNT)	10-20%	100%
		10	Persentase pangan organik	5%	20%
2	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	79.96	82.96
		2	Opini BPK RI	WTP	WTP

C. Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Perumusan sasaran program Badan Ketahanan Pangan merupakan penerjemahan dari Tujuan Badan Ketahanan Pangan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang disusun dengan metode Balanced ScoreCard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective adalah:

Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian di atas, kontribusi Badan Ketahanan Pangan pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam

negeri" dan Sasaran Strategis 3 "Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional". Sasaran strategis ini berada pada customer perspective yang berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani" pada stakeholders perspective.

Dengan kata lain, outcome Kementerian Pertanian berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan peran serta dari program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan koridor tersebut, dirumuskan sebanyak 6 (enam) Sasaran Program yang capaiannya diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja Sasaran Program.

Tabel 3.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	
				Sasaran Program	2020	2024
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	**1**	Meningkatnya Penjualan Beras Kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI (%)	**20**	**20**
		2	Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	**18**	**20**
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	**3**	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase PSAT Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)	**85**	**85**
		4	Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak	Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kapita/hari)	**260.2**	**316.3**
				Konsumsi Daging (kg/kapita/hari)	**13.5**	**14.7**
				Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kapita/hari)	**10.65**	**11.04**

3	Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	**5**	Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Ketahanan Pangan (nilai)	**23.62**	**24.51**
4	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	**6**	Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan Yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan (nilai)	**89.44**	**89.48**

D. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan tahun 2020-2024 adalah: Pemantapan Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Kebijakan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan berbasis pangan lokal; (b) penanganan akses pangan secara fisik dan ekonomi; dan (c) penanganan daerah rentan rawan pangan. Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (b) penguatan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, dan (b) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Strategi yang akan dilakukan untuk

mendukung arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan untuk pemantapan ketahanan pangan.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan, Strategi dan Langkah Operasional Badan Ketahanan Pangan 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi	Langkah Operasional
Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan	1 Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan 2 Menjaga stabilitas pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan 3 Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah 4 Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 5 Pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan 6 Pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Pemberdayaan masyarakat di daerah rentan rawan pangan melalui kegiatan aksi Badan Ketahanan Pangan 2 Penajaman analisis ketersediaan, kebutuhan komoditas pangan strategis nasional dan indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi 3 Peningkatan kemampuan dan jumlah kelembagaan distribusi dan cadangan pangan 4 Analisis pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen 5 Pengembangan industri pangan lokal 6 Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan 7 Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 8 Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan 9 Penguatan Birokrasi Institusi Badan Ketahanan Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

E. Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan, maka program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi adalah "Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat". Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Tabel 3.4 Program dan Sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Penjualan Beras Kepada Toko Tani Indonesia (TTI)	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
		Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
		Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	
		Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan Yang Efektif dan Efisien	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
		Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan Yang Akuntabel dan Berkualitas	

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan
1	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Meningkatnya Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
		Meningkatnya Pengawasan Pangan Segar yang beredar	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
2	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
		Terkelolanya Anggaran yang Akuntabel dan Berkualitas	

D. PERMASALAHAN

Pembangunan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan baik dari sisi supply (penyediaan) dan sisi demand (permintaan) pangan, penjabarannya sebagai berikut:

1. Supply (penyediaan), berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu:

   A. Produksi

   1) Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
   2) Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usahatani kecil disertai laju konversi lahan yang cukup tinggi.
   3) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.
   4) Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman belum dilaksanakan secara masif.
   5) Regenerasi petani berjalan lambat.

6) Tingginya food loss and waste.

B. Distribusi

1) Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil).
2) Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
3) Sebaran wilayah produksi di daerahdaerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan hanya searah dari produsen ke konsumen.
4) Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

2. Demand (permintaan), berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu:

a. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi.
b. Keamanan pangan akibat penggunaan bahan berbahaya dan/atau bahan kimia berbahaya pada makanan. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.
c. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
d. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsinya.
e. Triple burden malnutrition yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (overweight dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia.

3.3.3 Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepri

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya."

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pelayanan dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkuelanjutan
5. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan mengarah pada pencapaian unsur visi: makmur yaitu kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat dan sejahtera. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke- 1 yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat dengan tujuan percepatan pemulihan dan

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sasaran penguatan industri diantaranya pengembangan industri hilir dan pembukaan wilayah industri baru.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

A. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan)
2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan

B. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan

2. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pengendalian hama secara terpadu dan berkelanjutan
2. Meningkatkan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan serta pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
3. Memastikan ketersediaan pangan yang cukup melalui pemantauan harga dan pasokan, penyediaan cadangan pangan provinsi, dan penanganan kerawanan pangan
4. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Ketahanan pangan pertanian dan Kesehatan Hewan

D. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan penataan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana pertanian
2. Peningkatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, Alsintan, dan sarana pendukung pertanian
3. Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
5. Peningkatan penerapan penyuluhan pertanian
6. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan
8. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi
9. Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan
10. Peningkatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota
11. Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan provinsi
12. Peningkatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

13. Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi
14. Penanganan daerah rawan pangan
15. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota
16. Peningkatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi
17. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
18. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini

Table. 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan)	Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pengendalian hama secara terpadu dan berkelanjutan	• Peningkatan penataan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana pertanian • Peningkatan pengawasan sebaran pupuk, pestisida, Alsintan, dan sarana pendukung pertanian • Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran Benih tanaman • Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan • Peningkatan penerapan penyuluhan pertanian • Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian • Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatkan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan serta pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	• Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi • Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan • Peningkatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Memastikan ketersediaan pangan yang cukup melalui pemantauan harga dan pasokan, penyediaan cadangan pangan provinsi, dan penanganan kerawanan pangan	• Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan provinsi • Peningkatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan • Penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi • Penanganan daerah rawan pangan • Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota
		Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	• Peningkatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Ketahanan pangan pertanian dan Kesehatan Hewan	• Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

E. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1) Kurangnya akuntabilitas kinerja instansi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan
2) Belum optimalnya kualitas pelayanan dipengaruhi oleh sarana dan prasarana dan kualitas SDM yang masih kurang.

b. Permasalahan terkait pangan

1. Rendahnya produksi pangan dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan dari luar daerah/luar negeri
2. Belum optimalnya penanganan stabilitas pasokan harga pangan, terlihat dari harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen di empat Kabupaten tinggi.
3. Cadangan pangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum sesuai dengan standar dalam Permentan.

4. Distribusi pangan yang kurang optimal disebabkan oleh keterbatasan armada angkutan barang dan pelabuhan untuk penyediaan pangan di pulau-pulau.
5. Masih adanya daerah rawan pangan, dan belum jelasnya model dan komintmen dalam penanganan kerawanan pangan masyarakat.
6. Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara merata di kabupaten/kota dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Hal ini terlihat dari Skor Pola Pangan Harapan berada pada status cukup, yang berarti pola konsumsi pangan rata-rata penduduk belum sepenuhnya sesuai harapan.
7. Keamanan pangan yang kurang menjadi perhatian daerah, terlihat dari aktivitas pengawasan keamanan pangan dari pemerintah kabupaten/kota yang kurang.

c. Permasalahan terkait pertanian dan perkebunan

1) Kurangnya benih unggul, dipengaruhi oleh biaya ongkos kirim yang sangat besar untuk mendatangkan benih unggul.
2) Belum optimalnya produksi bibit bersertifikat untuk pemenuhan kebutuhan bibit di Provinsi Kepulauan Riau, dipengaruhi oleh kurangnya sumber benih dan kuantitas SDM balai benih.
3) Produktivitas karet yang rendah dipengaruhi oleh luas tanaman tua rusak, dan rendahnya harga karet sehingga petani tidak melakukan panen karet.
4) Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian berdasarkan komoditas.
5) Panjangnya rentang distribusi dari panen hingga ke konsumen, dan hilirisasi produk pertanian yang belum optimal.
6) Masih adanya hama penyakit tanaman yang berpengaruh terhadap produksi pertanian.
7) Masih rendahnya kemandirian dan kesejahteraan petani dipengaruhi kelembagaan petani yang masih lemah akibat kompetensi petani masih rendah, kultur masyarakat cenderung bukan petani, keaktifan kelompok petani dalam menerima penyuluhan yang kurang, jumlah penyuluh dan balai penyuluh pertanian yang masih kurang.

d. Permasalahan terkait peternakan dan kesehatan hewan

1) Kurang optimalnya upaya mempertahankan Kepulauan Riau bebas penyakit hewan menular strategis, penyakit zoonosis dan penyakit yang berasal dari produk pangan asal hewan dipengaruhi oleh ketersediaan obat-obatan yang kurang, kurangnya pencegahan, pengendalian, dan advokasi KIE mengenai kesehatan hewan.
2) Belum optimalnya produktivitas dan reproduksi ternak lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hewan ternak, disebabkan oleh pelaksanaan inseminasi buatan pada sapi yang masih kurang karena masih bertumpu pada anggaran dari pemerintah provinsi, sementara suport anggaran dari pemerintah kabupaten/kota sangat kurang.
3) Penyediaan pakan ternak masih kurang, disebabkan oleh belum operasionalnya lab pakan karena peralatan dan SDM belum tersedia.
4) Pengawasan dan pengujian dibidang kesehatan masyarakat veteriner dalam upaya penjaminan pangan asal hewan yang ASUH belum merata ke seluruh kabupaten/kota.
5) Masih banyaknya unit usaha yang belum memperoleh Sertifikasi unit usaha untuk memperoleh nomor kontrol veteriner, dan sertifikat kesejahteraan hewan bagi RPH/TPH.
6) Pelayanan pusat kesehatan hewan dan laboratorium yang masih kurang memadai karena kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan dan bahan uji.
7) Banyaknya pemotongan sapi betina produktif karena harganya lebih murah dari sapi jantan

Tabel 3.6
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketahanan pangan yang masih kurang	1) Rendahnya produksi pangan dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan dari luar daerah/luar negeri 2) Belum optimalnya penanganan stabilitas pasokan harga pangan, terlihat dari harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen di empat Kabupaten tinggi. 3) Cadangan pangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum sesuai dengan standar dalam Permentan. 4) Distribusi pangan yang kurang optimal 5) Masih adanya daerah rawan pangan 6) Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara merata 7) Keamanan pangan yang kurang menjadi perhatian daerah, terlihat dari aktivitas pengawasan keamanan pangan dari pemerintah kabupaten/kota yang kurang.	• Komitmen dan dukungan pemerintah kab/kota dalam penyediaan peningkatan ketersediaan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan kurang. • Keterbatasan armada angkutan barang dan pelabuhan untuk penyediaan pangan di pulau-pulau. • Budaya pola konsumsi pangan yang kurang beragam, bergizi dan berimbang. • Kurangnya pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Produktivitas pertanian dan perkebunan yang kurang	1) Kurangnya benih unggul, dipengaruhi oleh biaya ongkos kirim yang sangat besar untuk mendatangkan benih unggul. 2) Belum optimalnya produksi bibit bersertifikat untuk pemenuhan kebutuhan bibit di Provinsi Kepulauan Riau 3) Produktivitas karet yang rendah dipengaruhi oleh luas tanaman tua rusak, dan rendahnya harga karet sehingga petani tidak melakukan panen karet. 4) Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian berdasarkan komoditas. 5) Panjangnya rentang distribusi dari panen hingga ke konsumen, dan hilirisasi produk pertanian yang belum optimal. 6) Masih adanya hama penyakit tanaman yang berpengaruh terhadap produksi pertanian. 7) Masih rendahnya kemandirian dan kesejahteraan petani	• Kurangnya sarana produksi pertanian • Kurangnya sumber benih dan kuantitas SDM balai benih. • Kelembagaan petani yang masih lemah akibat kompetensi petani masih rendah, • Kultur masyarakat cenderung bukan petani • Keaktifan kelompok petani dalam menerima penyuluhan yang kurang • Jumlah penyuluh dan balai penyuluh pertanian yang kurang.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Produktivitas ternak yang masih kurang dan ancaman penyakit hewan menular strategis, penyakit zoonosis dan penyakit yang berasal dari produk pangan asal hewan	1) Kurang optimalnya upaya mempertahankan Kepulauan Riau bebas penyakit hewan menular strategis, penyakit zoonosis dan penyakit yang berasal dari produk pangan asal hewan 2) Belum optimalnya produktivitas dan reproduksi ternak lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hewan ternak 3) Penyediaan pakan ternak masih kurang, disebabkan oleh belum operasionalnya lab pakan karena peralatan dan SDM belum tersedia. 4) Pengawasan dan pengujian dibidang kesehatan masyarakat veteriner dalam upaya penjaminan pangan asal hewan yang ASUH belum merata ke seluruh kabupaten/kota. 5) Masih banyaknya unit usaha yang belum memperoleh Sertifikasi unit usaha untuk memperoleh nomor kontrol veteriner, dan sertifikat kesejahteraan hewan bagi RPH/TPH. 6) Pelayanan pusat kesehatan hewan dan laboratorium yang masih kurang memadai karena kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan dan bahan uji. 7) Banyaknya pemotongan sapi betina produktif karena harganya lebih murah dari sapi jantan.	• Ketersediaan obat-obatan yang kurang • Kurangnya pencegahan, pengendalian, dan advokasi KIE mengenai kesehatan hewan. • Pelaksanaan inseminasi buatan pada sapi yang masih kurang karena masih bertumpu pada anggaran dari pemerintah provinsi, sementara suport anggaran dari pemerintah kabupaten/kota sangat kurang. • Kesadaran pelaku usaha peternakan dalam pemenuhan standar usaha peternakan masih kurang • Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan dan bahan uji pusat kesehatan hewan • Kesadaran peternak masih kurang sehingga pemotongan sapi betina produktif banyak terjadi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah perencanaan dalam rangka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2021-2041 mencakup seluruh wilayah administrasi Kota Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
2. UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2000 dan terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
6. Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; dan
7. Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam.
8. Peraturan Dareh Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2021-2041

Selanjutnya, dengan difasilitasi oleh Biro Administrasi Pemerintahan – Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud telah diklarifikasi dan disepakati batas-batasnya oleh Kabupaten/Kota yang berbatasan yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Lingga.

3.4.2 Letak Dan Kondisi Geografis

3.4.2.1 Posisi Astronomis

Secara astronomis, wilayah administrasi Kota Batam dengan koordinat geografis 0°25’29” sampai dengan 1°15’00” Lintang Utara dan 103°34’35” sampai dengan 104°26’04” Bujur Timur.

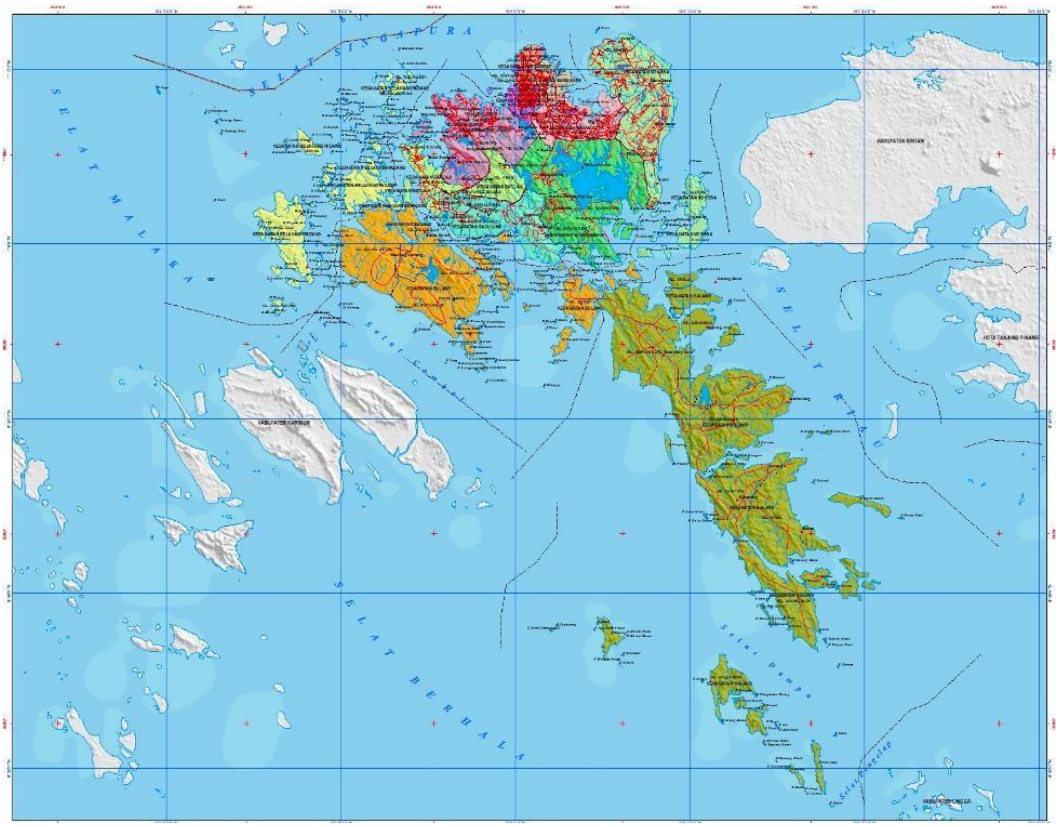

Lebih lanjut, mengacu pada peta di atas, dapat diketahui bahwa secara geografis mempunyai letak yang strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional, di

sebelah Utara wilayah Kota Batam berbatasan dengan selat Singapura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun, kemudian di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Letaknya yang sangat strategis menjadikan daerah ini selanjutnya ditetapkan sebagai daerah khusus yang dikembangkan sebagai daerah industri, perdagangan dan pariwisata. Waktu tempuh dari Kota Batam menuju Singapura dengan menggunakan transportasi laut hanya 40 menit dengan jarak sekitar 25 Km. Sedangkan waktu tempuh dari Kota Batam ke Pelabuhan Johor Malaysia melalui transportasi laut hanya 1 jam 45 menit dengan jarak sekitar 50 Km. Kondisi tersebut menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Kota Batam.

3.4.2.1 Posisi Geostrategik

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa letak Kota Batam berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, Wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya lahan dan tenaga kerja yang cukup serta adanya kemudahan investasi yang diberikan. Lebih jauh lagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kota Batam ditetapkan untuk pengembangan prioritas nasional sektor industri dan pariwisata, yakni pengembangan Integrasi Kawasan Industri Batam-Bintan, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) TWA Muka Kuning, Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya. Adapun diversikasi jenis pariwisata yang akan ditingkatkan mencakup: (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (heritage

tourism, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada Cultural Heritage Regeneration, dan wisata desa); (3) wisata buatan (meeting-incentive-convention-exhibition/MICE, yacht and cruise, wisata kebugaran/wellness tourism, wisata kesehatan/medical tourism, dan wisata olah raga). Dalam perspektif keamanan dan pertahanan Nasional, Kota Batam sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga, sekaligus sebagai pintu masuk kunjungan wisatawan mancanegara terbesar setelah Jakarta dan Bali memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara. Konsekuensi logis dari hal tersebut, segala aspek yang berpotensi mengganggu keamanan dan pertahanan di Wilayah Batam menjadi prioritas di tingkat nasional. Hal ini semakin memantapkan Kota Batam sebagai kota yang kondusif, aman dan nyaman.

3.4.2.2 Kondisi Kawasan

Wilayah Kota Batam secara geografis berada di perairan laut dangkal, dengan luas wilayah adalah 458.024 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 103.480 Ha (23%) dan luas wilayah perairan/laut 354.544 Ha (77%) (sumber: Bapelitbangda Kota Batam). Terdapat 370 buah pulau besar dan kecil (sumber: hasil verifikasi BIG tahun 2012). Pulau-pulau tersebut pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan. Adapun urutan beberapa pulau dari yang besar sampai terkecil antara lain di Kecamatan Bulang terdapat Pulau Buluh, di Kecamatan Galang terdapat Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Rempang, Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas dan Pulau Abang. Karakteristik kepulauan di Kota Batam memiliki keunikan tersendiri, dengan hamparan pulau-pulau yang banyak dan bentangan pantai yang cukup panjang. Sehingga dalam perspektif ke depan, Kota Batam dapat mengembangkan sumber daya kelautan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan

pesisir dan wilayah perairan laut.

3.4.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan 9 (sembilan) kecamatan berada di daerah perkotaan (Pulau Batam) sedangkan 3 (tiga) kecamatan berada di daerah pesisir. Jumlah kelurahan di seluruh kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan. 3 (tiga) kecamatan berada di daerah pesisir. Jumlah kelurahan di seluruh kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan.

Tabel . 3.7 Pembagian Wilayah Administratif Kota Batam

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)		Total
			Darat	Laut	
1	Belakang Padang	6	6,855	66,490	73,345
2	Bulang	6	15,893	26,550	42,443
3	Galang	8	35,331	211,816	247,147
4	Sungai Beduk	4	10,597	1,484	12,081
5	Nongsa	4	10,837	28,011	38,848
6	Sekupang	7	6,853	3,863	10,716
7	Lubuk Baja	5	1,116	3,714	4,830
8	Batu Ampar	4	1,096	8,276	9,372
9	Batam Kota	6	3,854	789	4,643
10	Segulung	6	5,495	925	6,420
11	Batu Aji	4	4,182	2,037	6,219
12	Bengkong	4	1,371	589	1,960
Total		**64**	**103,480**	**354,544**	**458,024**

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Dari data tersebut di atas, maka diketahui bahwa Kecamatan Galang memiliki luasan wilayah yang paling luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya, yaitu mencapai 53,96%. Sedangkan Kecamatan Bengkong merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan daerah lainnya, yaitu hanya sebesar 0,43%. Lebih lanjut, luas wilayah administratif kecamatan berdasarkan persentase disampaikan pada diagram di bawah ini

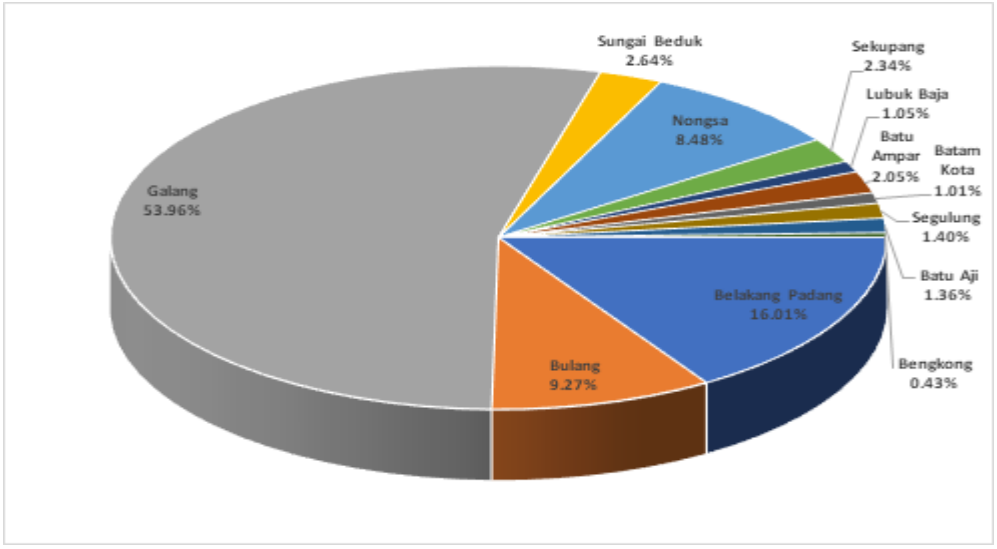

Gambar 2. 2 Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Batam (%)
Sumber: Bapelitbangda Kota Batam (diolah)

3.4.4 Kondisi Topografi dan Morfologi

Wilayah Kota Batam memiliki kontur permukaan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 mdpl hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove.

Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru

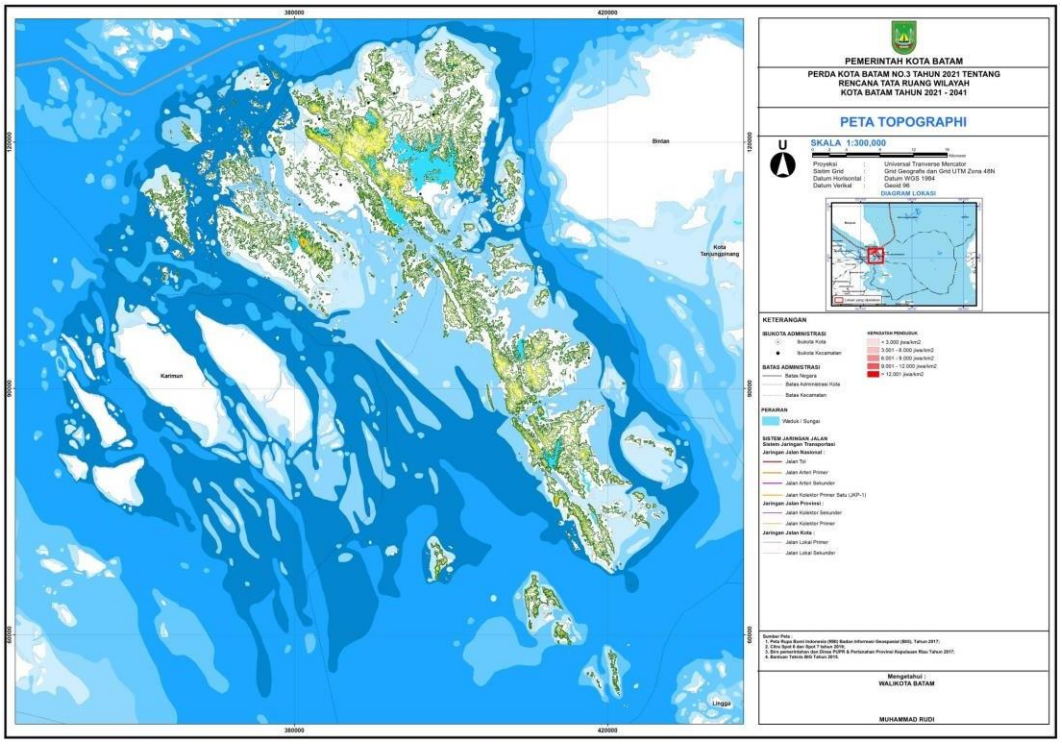

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kota Batam
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Berdasarkan hasil interpretasi peta topografi skala 1:50.000, informasi kemiringan lereng di Kota Batam diklasifikasikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 3.8 Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng

No	Kemiringan	Luas Kemiringan Lereng (km^2)
1	16 – 25 %	7,816
2	25 – 27 %	41,80
3	>27 %	53,72
4	8 – 16 %	322,0
5	3 – 8 %	282,5
6	<3 %	319,4

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Morfologi wilayah pada dasarnya merupakan gambaran bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya. Terkait dengan morfologi ini, di kawasan Batam, terdapat satuan morfologi daratan dan perbukitan. Adapun satuan morfologi daratan di sini merujuk pada bentuk alam yang didominasi oleh daratan yang relatif datar atau sedikit bergelombang. Di kawasan Batam, morfologi daratan yang ada adalah dataran rendah dan dataran bergelombang.

Gambar 3. 4 Peta Morfologi Kota Batam
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

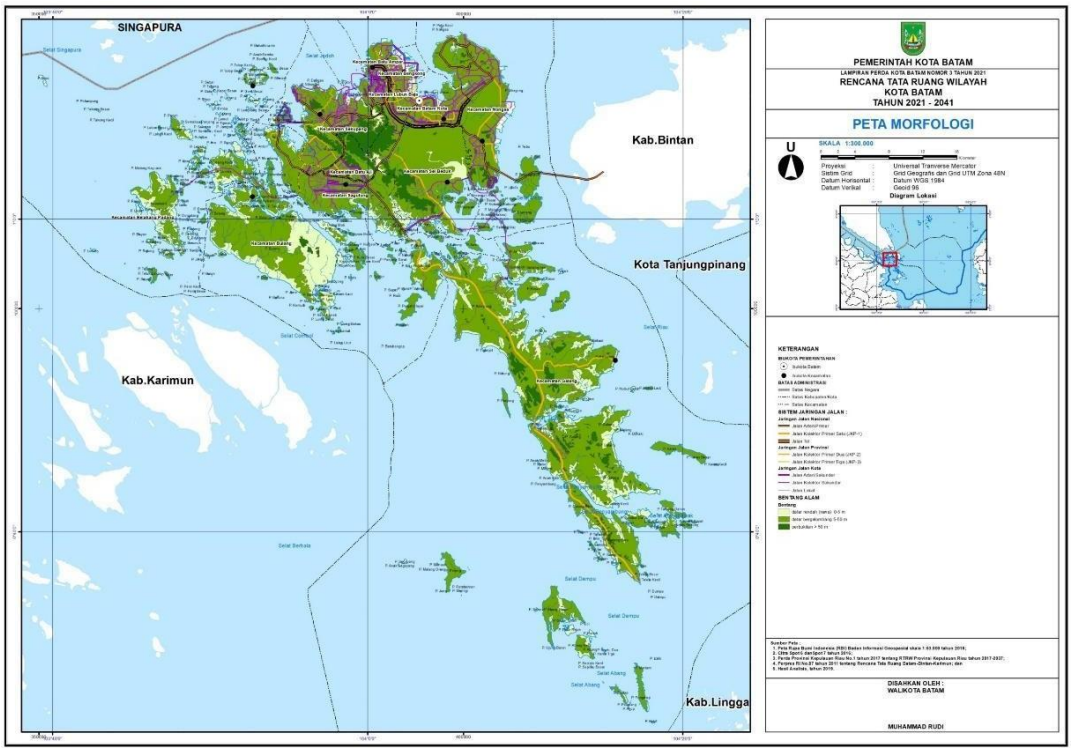

3.4.5 Kondisi Geologi Wilayah

Kota Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plases bawah laut. Berdasarkan interpretasi rekaman seismik, dinyatakan bahwa struktur bentang geologi yang terdapat di dasar laut

perairan Kepulauan Riau merupakan patahan dengan pola Barat Laut-Tenggara di bagian Barat perairan dan pola Barat-Timur di bagian Timur perairan hingga semuanya berkembang mengikuti tingkat kesuburan perairan yang tinggi, sehingga menjadikan perairan Kota Batam. sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan besar (baik jumlah maupun keragaman). Di samping itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan atau spesies terumbu karang (coral reef) dan berbagai jenis ikan karang (demersal) maupun ikan hias (ornamental fish). Pembentukan struktur geologi di Pulau Batam terdiri dari kelurusan berarah timur laut- barat daya yang oleh Katili (1977) dimasukkan ke dalam Laut Karimata yang berada di sebelah timur lajur timur. Selain itu terbentuk sesar normal (Kusnama, dkk., 1994). Seperti pulau-pulau kecil yang berada di garis khatulistiwa, kepulauan Kota Batam dan sekitar mempunyai kekhasan/karakteristik hidrogeologi dengan air permukaan melimpah dan air tanah dangkal. Adapun informasi mengenai luas dan persentase jenis geologi di Kawasan Batam disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 9 Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam

No	Jenis Geologi	Luas (Km^2)	Persentase
1.	Granit	82,05	7,9%
2.	Garis Tepi Pantai / Pulau	7,865	0,8%
3.	Formasi Tanjung Kerotang	274,5	26,4%
4.	Formasi Pancur	109,9	10,6%
5.	Formasi Goungon	495,6	47,7%
6.	Formasi Duriangkang	28,77	2,8%
7.	Aluvium	39,52	3,8%
Total		1038,21	100 %

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Oleh karena merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis keberadaannya di

perairan laut dangkal, maka wilayah Kota Batam yang sangat potensial untuk tumbuh kembang terumbu karang. Namun karena aktivitas antropogenik yang intensif, menjadikan kehidupan terumbu karang di wilayah Indonesia Barat hanya 5% luasan yang baik. Dalam perspektif ke depan, kiranya perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap sumber daya alam bawah laut di wilayah Batam.

3.4.6 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kota Batam dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air bawah tanah/air tanah dan air permukaan. Untuk jenis air tanah tersebar di 2 wilayah, yaitu:

1. Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah, serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal;
2. Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku. Jenis air tanah ini terdapat di bagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulang Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Mekawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

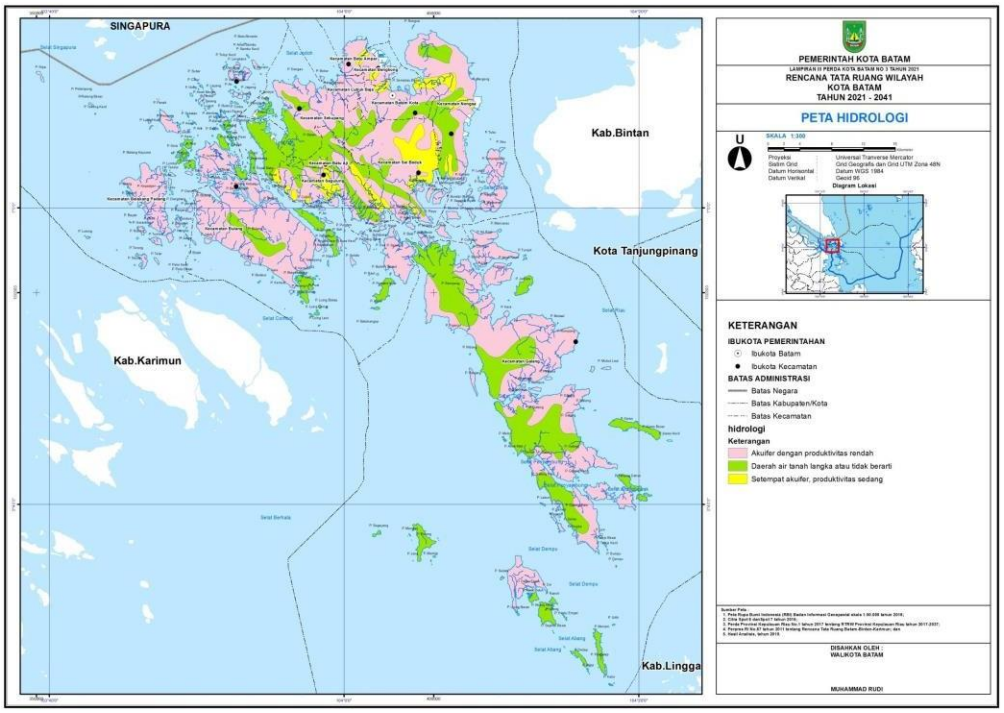

Gambar 2. 5 Peta Hidrologi Kota Batam
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Sedangkan untuk jenis air permukaan di Kota Batam terdapat pada Waduk Sei Baloi, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulang Lintang, Waduk Pulau Bulan, serta air permukaan lainnya yang bersumber dari Sungai Sagulung dan Sungai Nongsa. Masing-masing waduk dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sehingga waduk tersebut berfungsi sebagai penampung air baku untuk penyediaan air bersih di Kota Batam.

3.4.7 **Klimatologi**

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu udara minimum tahun 2020 berkisar antara 20,70 C - 23,90 C dan suhu maksimum berkisar antara 32,50 C - 35,30 C,

sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2020 adalah 26,850 C - 29,10 C, jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka telah terjadi peningkatan suhu, pada tahun 2019 suhu rata-rata sepanjang tahun 2019 adalah 26,90 C - 28,70 C.

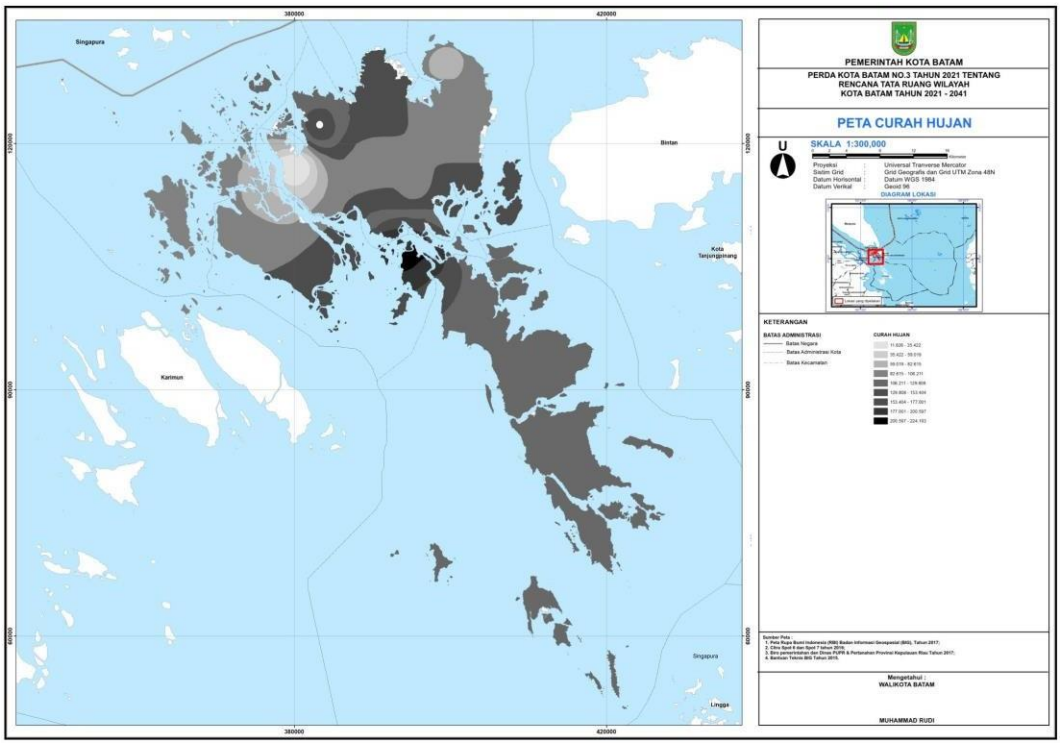

Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kota Batam 2020-2040

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Lebih lanjut tekanan udara rata-rata untuk tahun 2020 berkisar antara 1.010,65 mb - 1.013,57mb , sementara kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75,65% - 86,8%. Sementara itu, tekanan udara pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.011,4mb - 1.013,7mb dan kelembaban udara tercatat antara 74% - 85%. Untuk kecepatan angin, tahun 2019 tercatat kecepatan angin minimum sebesar 1 knot sedangkan maksimum tercatat sebesar 19 knot, terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 3,42 knot untuk kecepatan angin minimum dan 23 knot untuk kecepatan angin maksimum. Pada tahun 2020 jumlah hari hujan di Kota Batam sebanyak 233 hari dengan curah hujan sebesar 2.286,8 mm, terjadi peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah hari hujan sebanyak 155 hari dan curah hujan sebesar 1.227,5 mm. Jumlah hari hujan di tahun 2020 bertambah 78 hari, dan curahhujan bertambah 1.059,3 mm. Adanya kondisi peningkatan curah hujan dan penambahan jumlah hari hujan ditengarai oleh adanya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahaya yang memunculkan fenomena kekeringan. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Batam bersama

seluruh stakeholder untuk meminimalkan dampak perubahan iklim dari bencana hidrometeorologi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Batam.

3.4.8 Penggunaan Lahan

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 10 Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Batam

No	Pola Ruang Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
a	Kawasan Hutan Lindung	19.395
2	Kawasan Perlindungan Setempat	
a	Sempadan Sungai	9
b	Kawasan Sekitar Waduk	75
3	Kawasan Konservasi	
a	Taman Wisata Alam	901
b	Kawasan Taman Buru	2.642
4	Kawasan Cagar Budaya;	
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	404
6	RTH Kota	
a	RTH Publik	5.299
b	RTH Privat	
7	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Ruang Terbuka Hijau	33
8	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Ruang Terbuka Hijau	18

No	Pola Ruang Kawasan Lindung	Luas (Ha)
10	Kawasan Hutan Produksi;	
11	Badan Air	4.671
12	Kawasan Hutan Lindung/Badan Air	68
13	Badan Air/Kawasan Sumber Daya Air	1.941
TOTAL		**35.503**

3.4.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Tabel 3. 11 Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Batam

No	Pola Ruang Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9.101
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	2.361
3	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	11.514
4	Kawasan Perkebunan	1.622
5	Kawasan Peternakan	6.009
6	Kawasan Peruntukan Industri	11.603
7	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Peruntukkan Industri	663
8	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri	1.151
9	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Peruntukan Industri	3.628
10	Kawasan Pariwisata	8.389
11	Kawasan Hutan Lindung/Pariwisata	190
12	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Pariwisata	1.302
13	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pariwisata	397
14	Kawasan Perumahan	15.694
15	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	4.161
16	Kawasan Perkantoran	116
17	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkantoran	6
18	Kawasan Fasilitas Umum Dan Sosial	829
19	Kawasan Transportasi	2.453
20	Kawasan Taman Wisata Alam/Kawasan Perumahan	2
21	Kawasan Hutan Lindung /Kawasan Perumahan	653
22	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perdagangan Dan Jasa	67
23	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	14

24	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Transportasi	1
25	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Perumahan Seluas	4.534
26	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Perdagangan Dan Jasa	424
27	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	41
28	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Transportasi	103
29	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Perdagangan Dan Jasa	1.218
30	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Perumahan	657
31	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Transportasi	857
32	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	380
33	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	1
34	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	88
35	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	93
36	Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	15
37	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	18
38	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pembangkitan Listrik	6
	TOTAL	**90.361**

Sumber: Perda RTRW Kota Batam 2021 – 2041

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa uraian potensi pengembangan wilayah disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan uraian pada

sub bab terdahulu serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga penyajian potensi pengembangan wilayah diklasifikasikan ke dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah. Secara skematik kerangka pemikiran hubungan antara uraian kondisi geografi daerah dengan uraian potensi pengembangan wilayah disampaikan pada gambar di bawah ini.

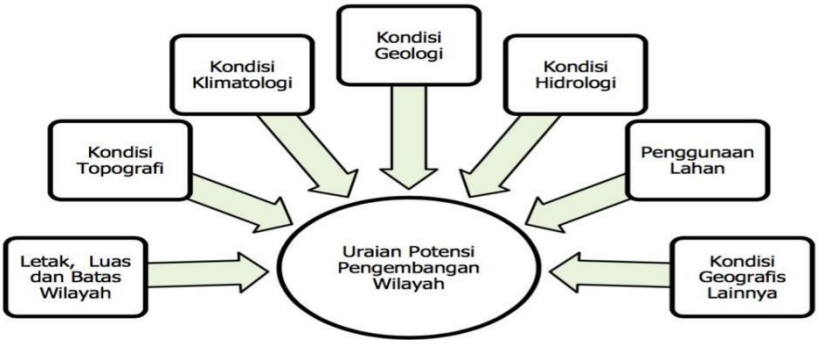

Gambar 3. 7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

3.4.10 Pola Ruang Wilayah

1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosialekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;
2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan, dll.) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
3. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

dengan pulau-pulau sekitar yang dapat dikembangkan juga sebagai Kawasan Strategis, Kawasan Cepat Tumbuh, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;
6. Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Pulau Batam, Pulau Rempang dan pulau- pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;
7. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di Pulau Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut;
8. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.

3.4.11 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lebih lanjut klasifikasi bencana meliputi:

1. Bencana Alam, terdiri dari (A) Bencana Geologi; (B) Bencana Vulkanologi; (C) Bencana Hidrometeorologi; (D) Karhutla;
2. Bencana Non Alam, terdiri dari (A) Gagal Teknologi; (B) Epidemi; (C) Wabah Penyakit; (D) Gagal Modernisasi;
3. Bencana Sosial, terdiri dari (A) Konflik Sosial; (B) Teror. Adapun potensi bencana di Kota Batam disampaikan pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Adapun potensi bencana di Kota Batam disampaikan pada Tabel di bawah ini

Jenis, Risiko dan Potensi Bencana di Kota Batam Berdasarkan Kasus

Tabel 3.12 Jenis, Risiko dan Potensi Bencana di Kota Batam Berdasarkan Kasus

Jenis Bencana	Risiko	Potensi	Keterangan
Bencana Alam Hidrometeorologi			
Kenaikan tinggi muka air laut	Abrasi (erosi pantai) - Akresi	√	Pulau Nongsa mengalami kemunduran akibat erosi (SDA Kementerian PUPR, 2017); Pulau Pelampong berpotensi hilang (Kementerian KKP, Tirto.id, 2016); Kawasan bukit dan perbukitan yang mempunyai kemiringan lereng > 15% dan rentan terhadap erosi/longsor, serta struktur batuan wilayah Kota Batam yang berupa jenis batuan dengan tingkat kestabilan yang cukup rendah (labil) dan mudah tererosi oleh air (*Business Case and Project Readiness Monorail* Batam, Bappenas 2015);
	Mempengaruhi Kemiringan Lereng Ling Pantai karena Banjir;	–	–
	Perubahan Suplai Sedimen	–	–
Peningkatan Gelombang Ekstrem	Membahayakan Keselamatan Pelayaran;	√	Dalam 5 tahun terakhir, setiap tahun BMKG merilis peringatan gelombang ekstrem periode bulan Nov-Jan di perairan Batam (BMKG); Perlu dilengkapi data jumlah kecelakaan kapal;
	Mengurangi Daya Jelajah Nelayan kecil <20GT	√	
Perubahan Curah Hujan	Bahaya Banjir;	√	Terdapat > 42 titik banjir di Kota Batam (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, 2021)

	Bahaya Ketersediaan Air;	√	Air minum Kota Batam diperoleh dari sumber air permukaan yang ditampung pada beberapa waduk/reservoir dengan kapasitas yang terbatas. Berdasarkan penelitian diperkirakan daya dukung alam (termasuk kemampuan suplai air minum) Pulau Batam hanya dapat memenuhi kebutuhan 700 ribu penduduk. Kondisi berdampak pada terbatasnya sumber air yang potensial untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi pengembangan industri. (Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia)
	Produksi komoditas sektor pertanian menurun;	–	–
Peningkatan Suhu	Bahaya Kekeringan Air;	√	Balai Wilayah Sungai (BWS) memprediksikan, jika tidak turun

Jenis Bencana	Risiko	Potensi	Keterangan
			hujan dalam bulan Feb-Mar-Apr 2020, maka ketersediaan air bersih hanya bisa dirasakan hingga 5 Juni 2020 mendatang.
	Produksi komoditas sektor pertanian menurun;	–	–
	Peningkatan perkembangan vektor penyakit (DBD) dan *heat-stress* di wilayah perkotaan	√	Tahun 2019 sebanyak 727 warga terkena DBD (Dinkes Kota Batam, 2021); Tahun 2020 sebanyak 763 warga terkena DBD (Kadis Dinkes,2021);
Bencana Non Alam			
Gagal Teknologi	Pencemaran tumpahan minyak kotor	√	Laut Belakang Padang tercemar tumpahan minyak (Media Center Pemko Batam, 12/11/2019); *Floating storage unit* di perairan Batam berpotensi terjadi *oil spill* (portonews.com, 23/5/2018);
Epidemi	Wabah penyakit yang disebabkan Virus	√	Pasien positif Covid-19 tercatat 19.683 orang per 19 Juli 2021 (Gugus Tugas Penanganan Covid Kota Batam);
Bencana Sosial			
Konflik	Konflik sosial;	√	Penutupan Radio Era Baru (2010) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018); Demonstrasi sopir taxi akibat konflik adanya penyedia jasa Taxi Baru (2012) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018) Konflik Taxi Online dan Konvensional (2019)

	Konflik Pertanahan	√	Adanya SK Menteri Kehutanan No.463 Tahun 2013 Tanggal 27 Juli, yang menetapkan lahan hunian yang telah ditempati warga sebagai hutan lindung (Jurnal Masyarakat Maritim vol. 2 no.1 2018); Adanya sengketa lahan 4300 M^2 yang mengakibatkan bentrok dan menelan 1 korban nyawa (2012) (Jurnal Masyarakat Maritim vol. 2 no.1 2018);
	Konflik Industrial	√	Demonstrasi Buruh menuntut UMK 50% dari tahun sebelumnya (2014) (Jurnal Masyarakat Maritim vol. 2 no.1 2018); Setiap tahun terjadi demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah minimum (Jurnal Masyarakat Maritim vo.l 2 no.1 2018);

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Batam memiliki potensi bencana dominan berupa bencana *hidrometeorologi*. Bencana tersebut dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim yang terjadi secara global dan hampir seluruh wilayah Indonesia berpotensi terdampak negatif. Dalam hasil Kaji Ulang Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim yang dilakukan Bappenas di tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang rawan terdampak negatif perubahan iklim. Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijabarkan bahwa perubahan iklim menjadi salah satu ancaman bagi terhambatnya pencapaian agenda pembangunan nasional dan daerah. Dokumen RPJMN telah menetapkan indikator dan target nasional Potensi Kerugian Ekonomi (*Potential Economic Losses*) dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas (sektor air, pertanian, kelautan dan pesisir serta sektor kesehatan) dengan menggunakan ukuran *Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bahaya Iklim* di sektor air, pertanian, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sektor kesehatan. Berdasarkan proyeksi yang telah dibuat, potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim secara nasional pada tahun 2020 sebesar 102,36 Triliun, tahun 2021 sebesar 105,72

Triliun, tahun 2022 sebesar 109,03 Triliun, 2023 sebesar 112,19 Triliun dan tahun 2024 sebesar 115,53 Triliun.

Gambar 3. 10 Potensi Kerugian Ekonomi Dampak Perubahan Iklim Sektor Prioritas (Rp Triliun)

Sumber: Ringkasan Eksekutif Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 2019

Keberhasilan pengurangan dampak negatif perubahan iklim tentu perlu kerja sama dan dukungan dari seluruh *stakeholder* pembangunan, terutama pemerintah daerah. Dalam perspektif ini, Pemerintah Kota Batam perlu menindaklanjuti kebijakan nasional untuk mengurangi Potensi Kerugian Ekonomi (*Potential Economic Losses*) pada sektor prioritas dengan melakukan penguatan data dan informasi terkait perubahan iklim, sebagai dasar bagi perumusan strategi, program dan kegiatan serta indikator yang mendukung upaya pengurangan dampak negatif dari perubahan iklim sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Kota Batam (melalui penyusunan RAD API atau mengintegrasikan program, kegiatan berbasis ketahanan iklim dalam dokumen perencanaan). Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan yang dihasilkan

merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang berketahanan iklim.

3.4.12 Demografi

Dalam perencanaan pembangunan, kondisi, dan perkembangan demografi berperan sangat penting. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, distribusi serta kompetensi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki kedudukan strategis dalam perumusan kebijakan.

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk Kota Batam dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kota Batam

Kecamatan	Luas Daratan (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Distribusi Penduduk 2020 (%)	Kepadatan Penduduk 2020 (Jiwa/Km2)
		2016	2017	2018	2019	*2020		
Belakang Padang	6.855	19.229	19.311	19.387	20.469	22.439	1,88	39
Bulang	15.893	9.924	9.969	10.012	11.310	10.707	0,90	23
Galang	35.331	15.723	15.788	15.843	17.183	16.989	1,42	8
Sei Beduk	10.597	86.691	87.386	88.018	86.220	96.193	8,04	797
Nongsa	10.837	63.133	65.094	67.002	71.847	81.451	6,81	281
Sekupang	6.853	124.165	124.165	131.001	141.314	156.283	13,07	1464
Lubuk Baja	1.116	86.193	86.751	87.249	90.560	84.533	7,07	2340
Batu Ampar	1.096	65.335	66.141	66.894	62.093	60.450	5,02	1512
Bengkong	3.854	10.622	108.091	109.866	111.923	119.836	10,02	6219
Batam Kota	5.495	243.952	257.674	271.454	176.287	198.617	16,61	4243
Sagulung	4.182	242.355	258.674	275.259	188.333	209.386	17,51	3279
Batu Aji	1.371	173.479	18.068	187.788	130.012	139.512	11,66	2252
JUMLAH	**103.480**	**1.236.399**	**1.283.196**	**1.329.773**	**1.107.551**	**1.196.396**	**100,00**	**1871**

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Batam sesuai dengan data hasil proyeksi BPS Kota Batam tercatat sebesar 1.236.399 jiwa. Dan selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus menjadi sebesar 1.196.396 jiwa. Jika dilihat sekilas dari tabel tersebut di atas, maka penurunan jumlah penduduk di Kota Batam mulai terjadi tahun 2019 akhir, hal ini lebih disebabkan karena berkaitan dengan adanya pembersihan data ganda nasional oleh tim pengolah data administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.Laju pertumbuhan penduduk Kota Batam periode 2010-2020 sesuai dengan data BPS Kota Batam adalah 2,35% yang berarti melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang mencapai 7,64%.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada tahun 2020, maka jumlah penduduk Kota Batam masih lebih dominan berada di wilayah Kecamatan mainland yaitu Kecamatan Sagulung (17,51%) dan Batam Kota (16,61%), sedangkan yang terendah berada pada wilayah Kecamatan hinterland yaitu Kecamatan Bulang (0,90%) dan Galang (1,42%). Secara rinci penjelasan mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta distribusinya sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel …

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel .. dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki luas wilayah daratan yang relatif kecil dengan kepadatan penduduk tinggi, yakni Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Bengkong. Sedangkan terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki luas wilayah daratan yang besar dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, yakni Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang. Proporsi luas wilayah daratan dengan tingkat kepadatan penduduk di suatu

wilayah seyogyanya memiliki proporsi yang seimbang. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga langkah perluasan wilayah kecamatan dapat menjadi solusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Penduduk Kota Batam pada tahun 2020 berjumlah 1,196,396 jiwa, jika dilihat menurut wilayah kecamatan, yang terbanyak jumlah penduduknya adalah di Kecamatan Sagulung dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak

209.386 jiwa. Di tempat kedua sampai dengan kelima terbanyak diikuti kecamatan Batam Kota, Sekupang, Batu Aji dan Bengkong masing-masing yaitu 198.617 jiwa, 156.283 jiwa, 139.512 jiwa dan 119.836 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan Bulang dan Galang masing- masing sebanyak 10.707 jiwa dan 16.989 jiwa.

Selanjutnya penduduk di Kota Batam dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya, sebagai informasi yang penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Jika dilihat dari struktur usia penduduk, berdasarkan gambar 2.11 Piramida Penduduk selama tahun 2020 Kota Batam didominasi penduduk usia 25-29 tahun dan usia 30-34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kota Batam dapat dikatakan masih cukup baik.

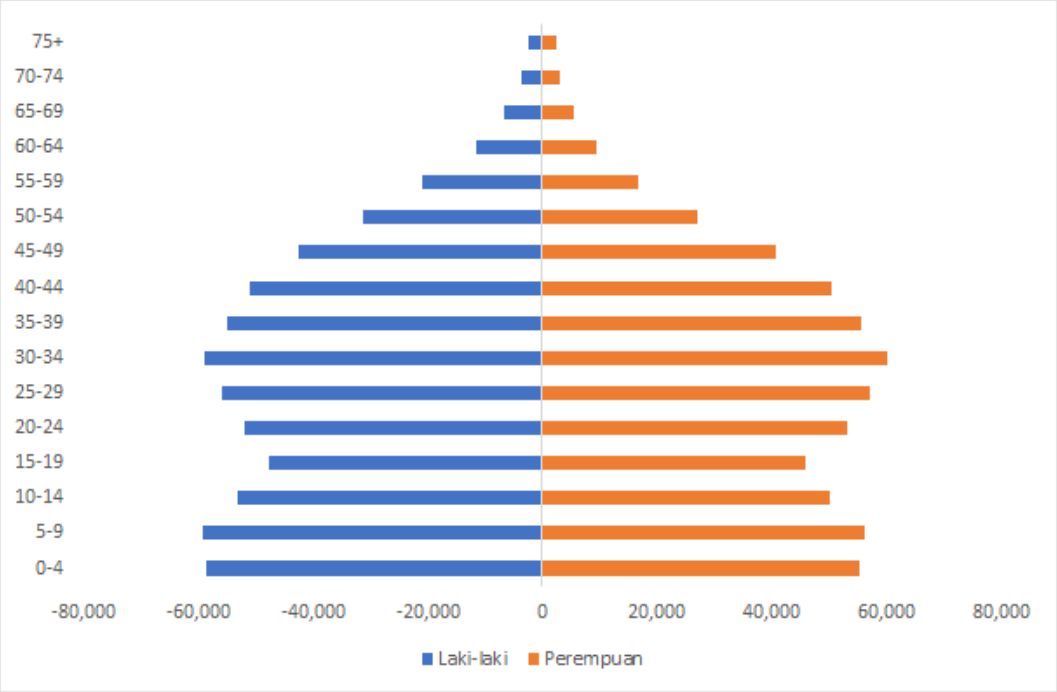

Gambar 3. 11 Piramida Penduduk Kota Batam Tahun 2020
Sumber: BPS Kota Batam SP2020 (diolah)

Dengan masih baiknya angka ketergantungan penduduk, menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kota Batam relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Selain itu, hal ini berarti Kota Batam mendapatkan bonus demografi yang sangat besar, sehingga perlu upaya keras agar tidak muncul fenomena *middle income trap* pada kelompok penduduk usia muda. Kemudian jumlah balita dalam tahun yang sama cenderung mengalami fluktuasi,

sama halnya dengan penduduk yang akan mengenyam pendidikan dasar dan menengah dalam 5-10 tahun

mendatang. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam Tabel

Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Umur Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	156.252	161.978	85.827	96.567	113.750
5-9	131.874	136.949	112.214	120.019	115.213
10-14	90.334	94.015	101.753	101.044	103.159
15-19	71.977	74.860	74.287	71.468	93.282
20-24	129.810	134.332	88.073	88.193	105.016
25-29	162.806	168.586	102.543	101.949	112.684
30-34	160.930	166.730	118.741	116.903	119.038
35-39	127.371	132.119	125.651	126.368	110.442
40-44	84.906	88.215	103.188	106.561	101.412
45-49	47.953	49.960	73.296	76.432	82.846
50-54	29.291	30.573	42.319	45.158	58.225
55-59	18.961	19.815	23.998	25.507	37.462
60-64	11.355	11.879	14.463	15.178	20.820
65-69	6.089	6.381	8.017	8.577	11.901
70-74	3.594	3.767	3.768	4.048	6.485
≥75	2.896	3.037	3.328	3.579	4.661
Total	**1.236.399**	**1.283.196**	**1.329.773**	**1.107.551**	**1.196.396**

Sumber: BPS Kota Batam

Penduduk Kota Batam jika dilihat menurut jenis kelamin rata-rata sejak tahun 2016-2020 sebesar 51 persen adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebesar

49 persen berjenis kelamin perempuan. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Secara rinci penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2016-2020

Kecamatan	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Belakang Padang	9,673	9,556	9,708	9,603	9,74	9,647	10,346	10,123	12,405	10,034
Batu Ampar	33,983	31,352	34,358	31,783	34,703	32,191	32,028	30,065	31,215	29, 235
Sekupang	63,757	60,408	65,456	62,181	67,091	63,91	71,697	69,617	79,153	77,130
Nongsa	33,362	29,771	34,356	30,738	35,317	31,685	37,388	34,459	42,380	39,071
Bulang	5,246	4,678	5,267	4,702	5,286	4,726	5,819	5,491	5,616	5,091
Lubuk Baja	43,048	43,145	43,270	43,481	43,459	43,79	45,223	45,337	41,919	42,614
Sungai Beduk	37,185	49,506	37,427	49,959	37,638	50,38	43,727	42,493	48,584	47,609
Galang	8,742	7,622	8,436	7,352	8,454	4,726	9,166	8,017	8,998	7,991
Bengkong	53,023	53,197	53,886	54,205	54,695	55,171	57,085	54,838	60,829	59,007
Batam Kota	121,95	121,998	128,645	129,029	135,339	136,115	88,073	88,214	99,067	99, 550
Sagulung	131,13	111,224	139,791	118,883	148,565	126,694	97,295	91,038	108,359	101,027
Batu Aji	90,564	82,915	94,204	86,476	97,781	90,007	66,402	63,61	70,874	68,638
Sub Total	631,34	605,061	654,804	628,392	678,068	651,705	564,249	543,302	609,399	586,997
Grand Total	1,236,399		1,283,196		1,329,773		1,107,551		1,196,396	

Sumber: BPS Kota Batam
**Untuk Data tahun 2020 bersumber dari Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kota Batam*

Selanjutnya struktur penduduk juga dapat dilihat dari aspek persentase penduduk berumur 5 tahun keatas menurut karakteristik dan status pendidikan yang menampilkan rasio penduduk yang masih bersekolah di tingkat SD sampai dengan tingkat SMA ke atas serta menampilkan penduduk yang belum bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Batam yang belum bersekolah laki-laki (4,53%) perempuan (5,02%), masih SD/Sederajat sebanyak laki-laki (15,62%) perempuan (13,83%), masih SMP/Sederajat laki-laki (4,39%) perempuan (5,24%), masih SMA ke atas sebanyak laki-laki (5,58%) perempuan (6,36)% dan penduduk yang tidak bersekolah

lagi sejumlah laki-laki (69,88%) perempuan (69,55)%. Hal ini juga dapat dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Sedangkan berdasarkan data yang bersumber dari Perda RTRW 2020-2040 proyeksi jumlah penduduk di Kota Batam tahun 2018-2037, proyeksi rata-rata peningkatan jumlah penduduk tertinggi ada pada Kecamatan Sei Beduk, dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,48% per tahun. Kemudian peningkatan penduduk kedua tertinggi berada pada Kecamatan Lubuk Baja. Lebih lanjut penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 3. 16 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2027

Kecamatan	Tahun						
	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027
Belakang Padang	19,567	19,165	18,783	18,361	17,958	17,556	17,154
Batu Ampar	11,061	10,991	10,920	10,850	10,779	10,709	10,638
Sekupang	14,883	14,642	14,402	14,161	13,921	13,681	13,440
Nongsa	73,671	70,271	66,871	63,471	60,071	56,672	53,272
Bulang	204,727	209,438	214,149	218,861	223,572	228,283	232,995
Lubuk Baja	72,831	74,490	76,149	77,808	79,467	81,126	82,786
Sungai Beduk	194,481	199,756	205,032	210,308	215,583	220,859	226,135
Galang	137,999	139,025	140,051	141,077	142,103	143,129	144,155
Bengkong	144,058	147,254	150,451	141,077	142,103	143,129	144,155
Batam Kota	93,239	92,567	91,914	91,251	90,599	89,925	89,263
Sagulung	57,715	54,787	51,858	48,929	46,001	43,072	40,144
Batu Aji	114,828	115,592	116,356	117,119	117,883	118,647	119,411
Total	1.139.060	1,147,988	1,156,916	1,165,843	1,174,771	1,183,698	1,192,626

Tabel 3. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2028-2034

Kecamatan	Tahun						
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Belakang Padang	16,751	16,349	15,947	15,544	15,142	14,740	14,337
Batu Ampar	10,568	10,497	10,426	10,356	10,920	10,215	10,144
Sekupang	13,200	12,959	12,719	12,478	12,238	11,997	11,757
Nongsa	49,872	46,472	43,072	39,673	36,273	66,871	29,473
Bulang	237,706	242,417	247,129	251,840	256,551	261,263	265,974
Lubuk Baja	84,445	76,149	87,763	89,422	91,081	92,740	94,339
Sungai Beduk	231,410	205,032	241,961	247,237	252,513	257,788	263,064
Galang	145,181	140,051	147,233	148,259	149,285	150,311	151,337
Bengkong	166,432	150,451	172,825	176,021	179,217	182,414	185,610
Batam Kota	88,600	91,914	87,724	86,612	85,949	85,286	84,624
Sagulung	37,215	51,858	31,358	28,429	25,501	22,572	19,643
Batu Aji	120,174	118,647	121,702	122,466	123,229	123,993	124,757
Total	1,201,554	1,162,796	1,219,409	1,228,337	1,237,899	1,280,190	1,255,120

Tabel 3. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2035-2037

Kecamatan	Tahun		
	2035	2036	2037
Belakang Padang	13,935	13,533	13,131
Batu Ampar	10,074	10,003	9,933
Sekupang	11,516	11,276	11,036
Nongsa	26,073	22,674	19,274
Bulang	270,686	275,397	280,108
Lubuk Baja	96,058	97,717	99,376
Sungai Beduk	268,340	273,615	278,891
Galang	152,363	153,389	154,415
Bengkong	188,806	192,002	195,199
Batam Kota	83,961	83,298	82,635
Sagulung	16,715	13,786	10,857
Batu Aji	125,521	126,284	127,048
Total	1,264,047	1,272,975	1,281,903

Sumber: Perda RTRW Kota Batam 2020-2040

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Reklamasi Pantai Skala Besar

Kawasan Batam dalam memenuhi kebutuhan lahannya dan menanggapi keperluan lahan yang strategis dan sesuai digunakan sebagai kawasan budidaya melakukan reklamasi di beberapa bagian pulau di kawasan ini terutama pada pesisir bagian utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Reklamasi yang dilakukan digunakan sebagai peruntukkan kawasan industri dan galangan kapal. Reklamasi yang dilakukan pada kawasan ini termasuk dalam reklamasi dalam skala besar. Reklamasi yang dilakukan merubah ekosistem dan bioregion yang ada di kawasan ini. Dalam melaksanakan reklmasi perlu diperhatikan beberapa hal yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan Kawasan BBK:

- **Aspek Fisik,** meliputi tata ruang, lahan, hidrologi dan jaringan drainase, hidro-eseanografi, muara sungai/ lidah pasir/ delta, geomorfologi, sarana dan prasarana sekitarnya, air tanah, material urugan;
- **Aspek Ekologi**, meliputi biota dan ekosistem perairan;
- **Aspek Hukum**, meliputi hukum adat dan hak atas tanah;
- **Aspek Sosial Ekonomi**, meliputi persepsi masyarakat, konsultasi publik, aktivitas ekonomi, demografi, peranan masyarakat, kearifan lokal, cagar budaya, dan situs sejarah;
- **Aspek Pendukung Lainnya**, meliputi pariwisata bahari, perhubungan laut, aksesibilitas lokasi, fasilitas umum.

b. Energi dan Ketenagalistrikan

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan prasarana khususnya pada prasarana ketenagalistrikan, perlu dilakukan kajian terhadap lokasi PLTD

(Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), sehingga dapat menjangkau/terdistribusi pada wilayah pengembangan secara efektif dan efisien. Selain itu perlu ditetapkan standar yang harus dipenuhi oleh PLTD. Apabila standar tersebut tidak terpenuhi indikasi daya dukung lingkungan hidup pada kawasan ini terlampaui.

Perlu penjajakan digunakannya PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dengan penggunaan batu bara. Dalam rencana tata ruang kawasan ini rencana penggunaan PLTU sudah ditetapkan beserta dengan lokasinya. Selanjutnya perlu kajian terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan PLTU ini. Hal ini dikarenakan pembangunan PLTU di satu sisi memenuhi kebutuhan listrik, akan tetapi di sisi lain harus dipertimbangkan juga apakah akan mempengaruhi daya dukung lingkungannya.

c. Sumber Daya Air

a. Air Permukaan

- **Pembangunan waduk baru.** Dalam pemenuhan sumber daya air dilakukan pembangunan waduk-waduk baru. Pembangunan waduk baru, didahului dengan kajian neraca air dalam satuan wilayah DAS/Sub DAS. Kajian ini telah dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Rencana sistem jaringan sumber daya air pada kawasan ini didasarkan pada neraca air di Kota Batam dan sekitarnya

b. Air Tanah

Kajian yang telah dilakukan lebih difokuskan pada potensi air tanah yang ada di kawasan Kota Batam berdasarkan batuan dan bentuk permukaan kawasan. Dalam melihat daya dukung air tanah pada kawasan ini, khususnya yang terkait dengan keseimbangan pemenuhan dan ketersediaan air tanah diperlukan kajian

berupa penyelidikan hidrogeologi yang lebih rinci, untuk mengetahui konfigurasi lapisan akuifer agar bisa menghasilkan kesimpulan dan penanganan yang lebih rinci.

Tabel 3.19 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam *Quick Appraisal*

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
1.	Alih fungsi lahan skonservasi TGHK menjadi kawasan budidaya			1. Mengubah ekosistem 2. Mengancam keaneka-ragaman hayati 3. Mengancam keterse-diaan sumber daya air	1. Mempertahankan keaneka-ragaman hayati yang ada 2. Mempertahankan kawasan resapan air	1. Perlu adanya kajian komprehensif termasuk kajian tata lingkungan 2. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kemampuan wila-yah
2.	Alih fungsi kawasan hutan bakau dan sempadan sungai			1. Dapat terjadi abrasi pantai dan sedimen-tasi sungai 2. Mengubah ekosistem	3. Mengembalikan fungsi kawa-san hutan bakau dengan melakukan penanaman kem-bali 4. Perluasan areal hutan pada kawasan yang dinillai tidak produktif dan memiliki daya dukung tanah yang rendah untuk dilakukan pembang-unan	1. Pembatasan kawasan perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan per-lindungan setempat 2. Pembuatan tanggul untuk mence-gah terjadinya kerusakan akibat adanya gelombang pasang 3. Peningkatan kegiatan perikanan di lokasi sempadan pantai 4. Budidaya terumbu karang

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
3.	Reklamasi pantai skala besar		1. Mengurangi tekanan atas kebutuhan lahan 2. Menghidupi transport-tasi air 3. Membuka peluang pembangunan tinggi 4. Meningkatkan penda-patan daerah 5. Kualitas rumah dan lingkungan meningkat 6. Lokasi strategis	1. Konflik social 2. Lahan tangkapan nela-yan berkurang, menja-dikan wilayah tangka-pan lebih jauh dan ru-ang tambatan perahu berkurang 3. Pendapatan nelayan cenderung menurun 4. Perubahan fungsi ba-ngunan	1. Menanam kembali pohon ba-kau untuk memperbaiki eko-sistem pantai	1. Memperhatikan pembangunan prasarana dan sarana agar tidak mengganggu aliran air/saluran drainase yang ada 2. Meminimalkan *cut and fill* 3. Perlu adanya kajian komprehensif termasuk kajian tata lingkungan 4. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kemampuan wi-layah
4.	Pengusahaan kawa-san lindung untuk ka-wasan budidaya (per-tambangan, industri, perdagangan dan ja-sa		1. Kegiatan perekono mian meningkat 2. Peningkatan pendapatan perkapita daerah dan penduduk 3. Lokasi strategis	1. Mengubah ekosistem setempat 2. Mengancam keanekaragaman hayati	1. Mempertahankan jalur hijau dan saluran drainase di kan-an kiri jalan 2. Mempertahankan keaneka-ragaman hayati yang ada	1. Pembatasan ijin penggunaan air tanah untuk pemanfaatan selain air minum

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
5.	Terbatasnya sumber air baku			1. Kebutuhan air bersih penduduk Kota Batam kurang tercukupi	1. Mempertahankan dan me-lindungi kawasan resapan air 2. Mengembangkan RTH di se-kitar mata air 3. Melindungi dan memelihara sumber-sumber air dari pen-cemaran	
6.	Terbatasnya kapa-sitas supply air mi-num dari PDAM Batam			1. Kebutuhan air minum penduduk Kota Batam kurang tercukupi	1. Mempertahankan dan me-lindungi kawasan resapan air 2. Mengembangkan RTH di se-kitar mata air 3. Melindungi dan memelihara sumber-sumber air dari pen-cemaran	

3.5 Penentuan isu-Isu Strategis

3.5.1 Bidang Pertanian

Potensi pertanian di Kota Batam sesuai dengan skenario pembangunan daerah terdapat pada 8 (delapan) kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan di Kota Batam, terutama di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pulau-pulau (kawasan hinterland) dengan jumlah rumah tangga petani sebanyak 2.189 RTP dengan jumlah penduduk sebanyak 6.567 jiwa petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel. 3.20 Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk (jiwa)
1.	Belakang Padang	540	1.620
2.	Bulang	377	1.131
3.	Galang	420	1.260
4.	Sei. Beduk	200	600
5.	Sagulung	239	717
6.	Batu Aji	88	264
7.	Sekupang	180	540
8	Nongsa	105	315
9.	Bengkong	0	0
10.	Batam Kota	40	120
11.	Lubuk Baja	0	0
12.	Batu Ampar	0	0
	J u m l a h	**2.189**	**6.567**

Sumber : Dinas KP2 Kota Batam

a. Perkembangan Harga Komoditi Hortikultura

Perkembangan Harga Komoditi Hortikultura Terutama Jenis Sayuran Pada Tahun 2021 Seperti Tabel 3.8.

Tabel 3.21. Daftar Perkembangan Harga Komoditi Sayuran di Kota Batam Tahun 2021

No.	Komoditi	Tingkat Harga (Rp./Kg)		
		Eceran	Pengumpul	Petani
1.	Bayam	4.000	3.000	2.000
2	Bawang Daun	20.000	17.000	15.000
3.	Bawang Merah	22.000	-	-
4	Bawang Putih	26.000	-	-
5.	S a w i	6.000	5.000	3.000
6.	Buncis	12.000	10.000	-
7.	Cabe Merah Besar	-	-	-
8.	Cabe Merah Keriting	45.000	41.000	37.000
9.	Cabe Rawit	35.000	32.000	28.000
10.	Kangkung	5.000	4.000	2500
11.	Ketimun	6.000	4.000	2.000
12.	Kol Bulat	9.000	-	-
13.	Kol Gepeng	9.000	-	-
14.	Kentang	12.000	-	-
15.	Tomat	10.000	-	-
16.	Terong	9.000	8.000	6.000
17.	Wortel	14.000	-	-
18.	Kacang Panjang	7.000	6.000	4.000

Sumber : Dinas KP2K Kota Batam

Pemasaran komoditi tanaman pangan dan hortikultura tidak ada masalah, mengingat kebutuhan akan komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang cukup tinggi.

Melihat kenyataan pada potensi sumber daya alam yang tersedia berupa lahan kering dan berada di pulau-pulau, berbagai komoditas pertanian/hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias/bunga cukup strategis

dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri dan menunjang pengembangan industri serta peningkatan ekspor.

b. Produksi Komoditi Tanaman Palawija

jumlah produksi Tanaman Palawija yang dimaksud adalah merupakan hasil dari beberapa komoditas pertanian yang meliputi produksi tanaman palawija seperti jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Capaian Produksi Tanaman Palawija tahun 2020 yaitu 19.158,50 Ton atau 98, 93 % dari target 2020 sedangkan jumlah produksi pada tahun 2019 yaitu 13,503 Ton ada kenaikan dari tahun 2019.

Tabel.3.22 Produksi Tanaman Palawija di Kota Batam Tahun 2017 s.d 2020

No	Komoditi	Produksi (Ton) 2017	Produksi (Ton) 2018	Produksi (Ton) 2019	Produksi (Ton) 2020
1.	Jagung Manis	2.440	2.303	1.897	2062
2.	Kacang Kedelai	-	14	22	2
3.	Kacang Tanah	93,71	-	-	
4.	Kacang Hijau		-	11.224	
5.	Ubi Kayu	8.204,61	11.822	360	16.658,14
6.	Ubi Jalar	278,98	264	-	436.36
Jumlah		**11.016,59**	**14.403,00**	**13.503**	**19.158,60**

Tabel Sumber : Dinas KP2K Kota Batam

Produksi untuk masing-masing jenis tanaman palawija yang paling tinggi adalah produksi ubi kayu sebesar 16.658,14 Ton, ada beberapa komoditi yang belum di panen pada tahun 2020 dapat dilihat bertambahnya luas tanam pada tahun 2020.

Gambar Grafik 3.12 Produksi Tanaman Palawija Kota Batam 2017 s.d 2020

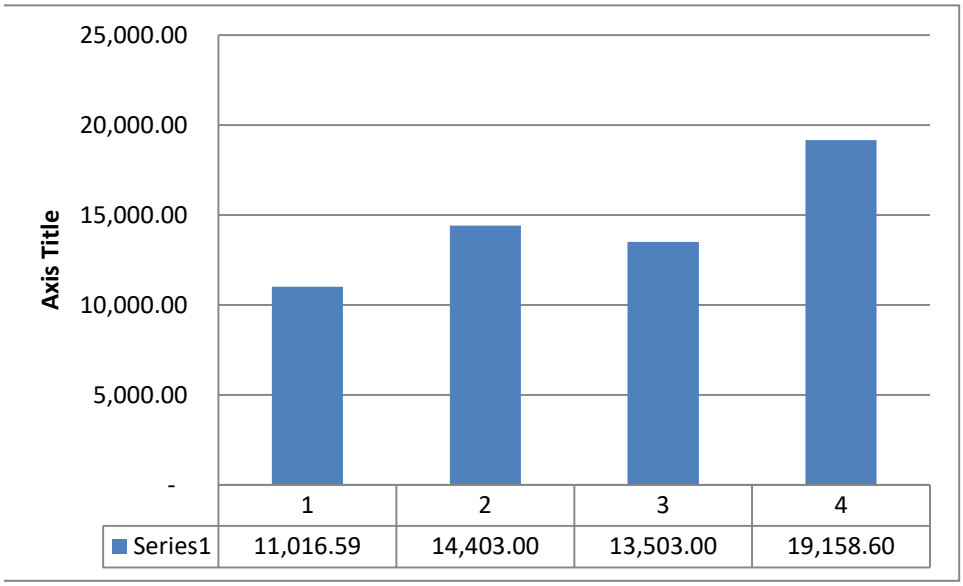

Dilihat dari Grafik Produksi Tanaman Palawija di Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan 2020 Produksi Palawija 2020 ada kenaikan dari tahun 2019 walaupun menagalami kenaikan produksi tetapi kendalayang dihadapi petani adalah Alih pungsi Lahan pertanian di Kelurahan Tembesi serta Cuaca Extrem (Kemarau) selain itu Perubahan Pola tanam yang di lakukan oleh petani.

Produktivitas Komoditi Palawija yang dimaksud adalah merupakan hasil dari beberapa komoditas pertanian yang meliputi perbandingan produksi dengan luas panen pada tanaman palawija. Capaian Produktivitas Tahun 2018 sebesar 23,15 dan 2019 adalah 23,81 Kw/Ha Sedangkan Produktifitas 2020 sebesar 23,08 ada penurunan pada tahun 2020 tetapi tetap melampaui target 2020.

Tabel. 3. 23. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Palawija di Kota Batam Tahun 2020

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	Jagung	332.00	286.00	2062.00	72.10
2.	Kedelai	6.00	2.00	2.00	10.00
3.	Kacang Tanah	-	-	-	-
4.	Ubi Kayu	407.00	390.00	16658.15	427.13
5.	Ubi Jalar	39.00	36.00	436.36	121.21
6.	Kacang Hijau	-	-	-	-
Jumlah		784.00	714.00	19158.50	268.33

c. Produksi Komoditi Hortikultura

indikator jumlah produksi Produksi Tanaman Sayur-sayuran yang dimaksud adalah merupakan hasil dari beberapa komoditas pertanian yang meliputi produksi tanaman sayuran seperti Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Terung, Buncis, Ketimun, kangkung, Bayam Parea, Pitula, Sawi, Daun bawang . Capaian produksi hasil pertanian Sayuran tahun 2018 mengalami penurunan yaitu **21.830,20** ton sedangkan jumlah produksi pada tahun 2017 sebesar **30.134,48**. Tahun 2019 dengan produksi **13.662.80** Dengan rincian produksi jenis tanaman sayur-sayuran dibandingkan tahun 2020 produksi sebesar 18.635,60 ada kenaikan dari tahun 2019.

Tabel 3.24 Produksi Sayuran di Kota Batam Tahun 2017 s.d 2020

No	Komoditi	Produksi (Ton) 2017	Produksi (Ton) 2018	Produksi (Ton) 2019	Produksi (Ton) 2020
1	Kc. Panjang	4.421,37	349,08	1.741,80	1638.8
2	Cabe Besar	1.983,39	246,73	1.216.90	1433.45
3	Cabe Rawit	1.352,90	1.321,50	578	807.9
4	Terung	1.549,89	1.861,80	964,30	922
5	Buncis	265,02	14,00		7.00
6	Ketimun	6.188,07	374,17	1.919,30	1898.80
7	Kangkung	4.607,81	354,68	2.326.20	2073.70
8	Bayam	3.822,06	3.220,20	2.378.40	2146.40
9	Parea	9.27,42	-	-	2422.50
10	Pitula	1.790,43	-	-	
11	Sawi	3.042,61	1.746,60	2.042,40	1490.6
12	Daun Bawang	183,51	419,50	490,50	297.7
13	Bawang Merah			5	12
14	Gambas				2307.75
15	Kecipir				1177.00
Jumlah		**30.134,48**	**21.830,20**	**13.662,80**	**18.635,60**

Sumber : Dinas KP2K Kota Batam

Gambar Grafik 3.13 **Produksi Sayuran di Kota Batam Tahun 2017 s.d 2020**

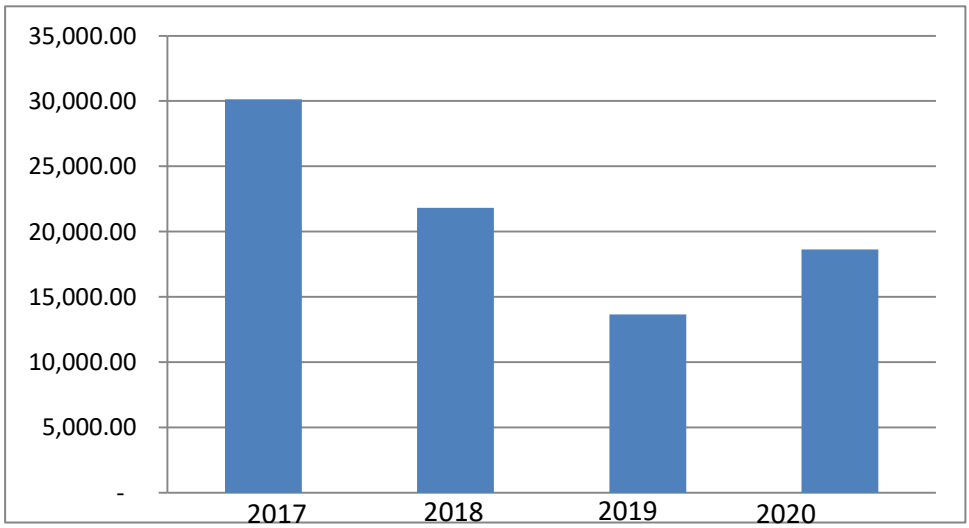

Produktivitas komoditi sayuran yang dimaksud adalah merupakan hasil dari beberapa komoditas pertanian yang meliputi perbandingan produksi dengan Luas Panen pada tanaman sayuran. Capaian Produktivitas Tanaman sayuran adalah **6.6** Kw/Ha

Tabel. 3.25 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran di Kota Batam Tahun 2020

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Kw/Ha)
1	Bawang Merah	5.00	2.00	12.00	60.00
2	Bawang Daun	64.00	58.00	297.70	51.33
3	Petsai/Sawi	244.00	228.00	1490.60	65.38
4	Kacang Panjang	269.00	234.00	1638.80	70.03
5	Cabai Besar	239.00	201.00	1433.46	71.32
6	Cabai Rawit	124.00	101.00	807.90	79.99
7	Terung	120.00	96.00	922.00	96.04
8	Buncis	3.00	1.00	7.00	70.00
9	Ketimun	253.00	214.00	1898.80	88.73
10	Kangkung	340.00	311.00	2073.70	66.68
11	Bayam	371.00	339.00	2146.40	63.32
12	Pare	350.00	323.00	2422.50	75.00
13	Gambas	319.00	307.00	2307.75	75.17
14	Kecipir	220.00	214.00	1177.00	55.00
	Jumlah	2032	2629	18635.60	66.00

Adapun program agribisnis yang potensial di Kota Batam terutama di bidang agribisnis hortikultura meliputi :

a). Pengembangan Agribisnis Sayuran Dataran Rendah

- Terutama di kawasan Bonded, yakni Kec. Sei Beduk dan Kec. Sekupang serta sebagian Kec. Belakang Padang.

- Pembangunan Packeging House, sebagai tempat processing center, kemasan/packing, cold storage serta pusat informasi, promosi dan gerbang ekspor/pasar.
- Komoditi utama meliputi Bayam, Kangkung, Kacang Panjang, Ketimun, Sawi, Cabe.

b). Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan dan Tanaman Hias

- Diarahkan pada kawasan Hinterland terutama Kec. Bulang, Kec. Galang dan Kec. Belakang Padang.
- Pola agregat dan pekarangan serta pola kawasan sentra produksi komoditi unggulan.
- Memberdayakan petani dengan mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang efisien dan efektif.
- Komoditi utama meliputi Mangga, Durian, Rambutan, Nangka.

c). Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi (PDPG)

- Diarahkan dalam upaya menekan ketergantungan pada bahan pangan pokok beras, melalui diversifikasi usaha tani komoditas tanaman pangan penghasil karbohidrat (seperti : jagung, ubi kayu, ubi jalar).
- Peningkatan gizi keluarga tani melalui penganekaragaman konsumsi dan pengembangan Tabulapot/Tabulakar.

e). Sumber Daya Institusi

- Institusi Perbenihan/Kebun Bibit

  Bidang Pertanian Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memiliki kebun bibit yang terletak di Tanjung Kubu Kelurahan Bulang Lintang

Kecamatan Bulang. Kegiatan utamanya adalah perbanyakan bibit tanaman induk buah-buahan dengan luas areal kebun bibit adalah ± 2 Ha.

2. Bidang Penyuluhan

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kota Batam berjumlah satu unit dalam kondisi bangunan baik.

Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kelembagaan dan Penyuluh :

- Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani/wanita tani di bidang manajerial teknis Budidaya dan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman.
- Penyuluhan manajemen kelompok dan pencegahan/penanganan Penyakit pada Sapi Bantuan Pemerintah di daerah Pengembangan Ternak Sapi di Tanjung Kubu, Karas, Kepala Jeri, Bulang Kebam dan Subang Mas
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian dengan mengganti Kendaraan Bermotor beroda dua sebanyak 4 unit Rusak Berat dengan motor lapangan karena lokasi pengembangan Pertanian belum memiliki jalan desa.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian dengan mengganti Kendaraan Bermotor beroda empat sebanyak 1 unit Rusak Berat dengan Mobil double kabin agar dapat melaksanakan Penyuluh dengan tim dan perlengkapan penyuluhan.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian alat penunjang Penyuluhan seperti GPS, Alat ukur PH Tanah

Compateble, Drone, Alat Ukur Unsur Hara Tanah, dan Pakaian Lapangan.

- Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat/petugas bidang pertanian Tanaman Pangan Hortikultura.
  - tingkat Kota Batam (4 orang),
  - tingkat lapangan / PPL (11 orang terdiri dari 4 Orang PPPK, 1 Orang PNS Fungsional, 3 orang PNS Fungsional Umum dan 3 orang THL)

e). Sumber Daya Institusi

- Institusi Perbenihan/Kebun Bibit

  Bidang Pertanian Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memiliki kebun bibit yang terletak di Tanjung Kubu Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang. Kegiatan utamanya adalah perbanyakan bibit tanaman induk buah-buahan dengan luas areal kebun bibit adalah ± 2 Ha.

- Institusi Penyuluhan

  Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kota Batam berjumlah satu unit dalam kondisi bangunan baik berlokasi Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang dan DKPP Kota Batam menugaskan 1 Orang THL sebagai petugas penjaga Barang Milik Daerah.

  Dengan Jumlah Kelompok Tani sebanyak 170 Poktan diharapkan dapat dibuat BPP di lokasi Pengembangan Pertanian seperti di Galang, Sei Beduk dan Sagulung untuk ditempatkan PPL di BPP tersebut namun terkendala dengan ketersediaan Lahan dilokasi Pengembangan Pertanian untuk pembangunan BPP tersebut ± 5 Ha (Bangunan dan Lahan Demplot PPL)

- Institusi Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian

  Kota Batam belum memiliki tempat pengolahan (pasca panen) untuk menampung Produksi pertanian yang tidak terserap Konsumen Kota Batam. Sehingga diharapkan Kota Batam memiliki UPT Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian agar dapat berkontribusi dalam penyerapan Produksi Pertanian/Peternak dengan penanganan Pasca Panen yang baik untuk meningkat daya jual dan daya tahan produk sehingga dapat diterima oleh Pasar Modern/Mall/Supermarket dan ekspor

Tabel 3.26. Jumlah BPP, WKPP dan PPL di Kota Batam Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	BPP (Unit)	WKPP (Unit)	PPL (Orang)	PPS (Orang)
1.	Belakang Padang	1	1	1	-
2.	Sagulung	-	1	1	-
3.	Sekupang	-	1	1	-
4.	Batu Ampar	-	1	1	-
5.	Batam Kota	-	1	1	-
6.	Lubuk Baja	-	1		-
7.	Nongsa	-	1		-
8.	Batu Aji	-	1	1	-
9.	Sei Beduk	-	1	1	-
10.	Bengkong	-	1	1	-
11.	Bulang	-	1	1	-
12.	Galang	-	1	2	-
	Jumlah	**1**	**12**	**11**	**-**

Sumber : DKPP Kota Batam

Tabel 3.27. Jenis Kelompok Tani dan Rincian Berdasarkan Kelasnya di Kota Batam Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani				Jumlah Gapoktan
		Kelompok Tani/Peternak	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Kelompok Tanaman Hias	Kelompok Pengolahan Hasil dan Pemasaran	
1.	Bel. Padang	10	2	-	-	
2.	Nongsa	5	1	-	-	1
3.	Sekupang	6	6	1	-	
4.	Bulang	14	-	-	-	
5.	Batu Ampar	-	5	-	-	
6.	Lubuk Baja	-	2	-	-	
7.	Sei Beduk	23	8	-	1	1
8.	Sagulung	17	2	-	-	2
9.	Batu Aji	4	6	-	-	1
10.	Batam Kota	-	7	1	-	
11.	Bengkong	-	1	-	1	
12.	Galang	47	-	-	-	2
	Jumlah	**126**	**40**	**2**	**2**	**7**

Sumber : Simluhtan DKPP Kota Batam

3.5.2 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.5.2.1 Perbibitan dan Produksi Peternakan

Kota Batam bukan merupakan daerah yang dikembangkan sebagai sentra produksi Peternakan, namun kebutuhan akan protein hewani sangat penting bagi masyarakat Kota Batam mengingat Kota Batam yang berpenduduk 1.038.849

jiwa (data Juni 2021) sangat membutuhkan Pangan Asal Hewan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Kota Batam. Populasi ternak di Kota Batam cukup fluktuatif jumlahnya, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat perkembangannya begitu dinamis terkait dengan faktor kelahiran, kematian, pemotongan, pemasukan dari luar daerah, dan pengeluaran dari Kota Batam. Pada tahun 2021 populasi ternak tersebut sebagaimana tertera pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28. Populasi dan Produksi Ternak Sapi, Kambing, Babi dan Ayam di Kota Batam Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021
1	**Populasi (Ekor)**	
	I. TERNAK BESAR	
	Sapi Potong	692 Ekor
	Sapi Perah	-
	Kerbau	-
	Kuda	12 Ekor
	II TERNAK KECIL	
	Kambing/Domba	1550 Ekor
	Babi	278.670 Ekor
	III. TERNAK UNGGAS DAN ANEKA TERNAK	
	Ayam Buras	790.343 Ekor
	Ayam Broiler/Pedaging	21.900.000 Ekor
	Ayam Layer/Petelur	187.000 Ekor
	Itik Petelur	600 Ekor
	Itik pedaging	2.700 Ekor
	Puyuh	5200 Ekor
	Angsa	150
	Kalkun	75
	Kelinci	250 Ekor
	Rusa	60
	I. HEWAN KESAYANGAN	
	Anjing	49,657 Ekor
	Kucing	82,765 Ekor
	Burung Kicau	-
	Burung Merpati	-
2.	**Produksi**	
	Ayam Broiler/Pedaging	16,425,000 Ekor
	Ayam Ras Layer/Petelur	41,975,000 Butir
	Ayam Buras	1,095,000 Ekor

Sumber : Dinas KP2K Kota Batam

Ketersediaan produksi hasil ternak berupa daging dan telur, belum mampu memenuhi angka kebutuhan konsumsi sesuai standar norma gizi, kecuali untuk produksi daging ayam, tingkat produksi sudah memenuhi kebutuhan konsumsi. Sementara ini, kebutuhan daging sapi masih dipenuhi dari luar Kota Batam dan daging impor beku dari luar negeri, sedangkan kebutuhan telur disuplai dari luar Kota Batam dan baru sebagian kecil dari Batam dan sekitarnya.

Perbandingan ketersediaan dan angka kebutuhan konsumsi seperti tertera pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29. Perbandingan Angka Kebutuhan dan Ketersediaan Konsumsi sesuai Standar Norma Gizi Tahun 2021

No	Komoditi	Kebutuhan (Ton/Hari)	Ketersediaan (Ton/Hari)	Kelebihan/Kekurangan (Ton/Hari)
1.	Daging Sapi	11.57	1	Minus 10.57 (-91.36%)
2.	Daging Ayam	61.78	62.29	0,51 (0,83 %)
3.	Telur	29.67	29.55	Minus 0,12 (- 0,40 %)

Sumber : Dinas KP2K Kota Batam

Sejauh ini kebutuhan daging bagi masyarakat Kota Batam masih disediakan oleh pemasok / pedagang ternak sapi/kambing yang dikoordinir oleh Asosiasi Pedagang Hewan Ternak Kota Batam dengan rata-rata per bulan ± 150 ekor sapi dan ± 450 ekor kambing dan Pemasukan daging import ke Kota Batam sebagai berikut ; PT. Batam Frozen Food ± 120.000 kg/Tahun, PT. Kharisma Karya Kartika ± 130.000 kg/Tahun dan PT. Dwi Kartika Inti ± 100.000 kg /Tahun.

Tabel 3. 30. Rata – rata Pemasukan Ternak dan Daging Sapi dari Luar Kota Batam (Luar Negeri (Import) dan Lokal) per Tahun

No	Importir/ Pedagang	Daging Sapi Impor	Asal
1	PT. Batam Frozen Food	± 94.000 kg	Australia dan New Zealand
2	PT. Kharisma Karya Kartika/ PT. Seraya Mutiara Sejati	± 186.000 kg	Australia dan New Zealand
3	PT. Dwi Kartika Inti	± 122.786 kg	Australia, New Zealand
4	PT. Aneka Tata Niaga	± 50.000 kg	Australia, New Zealand

Sumber : Dinas KP2K Kota Batam

Untuk peternakan ayam broiler Kota Batam memiliki 8 peternakan besar yang menjalani usahanya di sekitar Kecamatan Galang dan Bulang dengan jumlah populasi Tahun 2021 ± 1.713.000 ekor, sedangkan untuk peternakan ayam buras belum belum ada usaha yang bersakal besar, baru diusahakan oleh kelompok–kelompok peternak dengan skala rumah tangga yang tersebar di Kecamatan Galang sebanyak 3 Kelompok dan Kecamatan Belakang Padang sebanyak 5 Kelompok, dengan populasi ternak ayam buras Tahun 2016 sebanyak ± 740 343 ekor. Perusahaan peternakan babi di Kota Batam yang dilegalkan hanya dialokasikan di Pulau Bulan Kecamatan Bulang dengan Penjualan export ± 120.00 ekor/bulan dan untuk lokal sekitar ± 1.440 ekor /bulan.

Dengan kondisi hal tersebut diatas maka sewajarnya bila Kota Batam dapat lebih fokus dalam pembangunan di Bidang Peternakan dan mengalokasikan daerah yang bisa dijadikan sentra produksi peternakan untuk memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan Asal Hewan di Kota Batam.

Adapun kegiatan yang akan Seksi

3.5.2.2 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

4. Kota Batam termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari wilayah / daerah lain karena merupakan daerah lalu lintas hewan, produk asal hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) antar provinsi dengan adanya bandar udara dan pelabuhan laut sebagai pintu masuk hewan, produk asal hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) baik dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan perlunya tindakan 3 E (Early Detection, Early Respon dan Early Report) terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari luar Kota Batam masuk ke Kota Batam. Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam bekerjasama Instansi Terkait seperti Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas HPM dari dan keluar Kota Batam.
5. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakn Tugas Pokok dan Fungsi dari Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu berupa pelaksanaan program pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular

baik strategis maupun zoonosis . Adapun Jenis penyakit hewan menular strategis yang diawasi adalah Anthrax, Flu Burung / Avian Influenza (HPAI dan LPAI), Rabies, Salmonellosis, Helminthiasis, Brucellosis, Jembrana, Hog Cholera, PRRS, H1N1 dan ASF. Dari penyakit straegis tersebut da penyakit hewan menular yang juga bersifat zoonosis Anthrax, Flu Burung / Avian Influenza (HPAI dan LPAI), Rabies, Salmonellosis, Helminthiasis. Penularan Penyakit hewan Menular Strategis dan Zoonosis tidak hanya menular lewat hewan tetapi juga menular lewat produk asal hewan (food borne disease). Program pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan yaitu berupa Surveilans dan Monitoring baik di Peternakan Unggas Komersial, Pasar Basah, Kelompok Peternak, Importir Jenis penyakit hewan yang telah dilakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terdapat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.31 Jenis Penyakit Hewan Yang dilakukan surveilans dan Monitoring oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Bekerjasama dengan Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2021

No	Jenis Penyakit Hewan	Jenis Test/Uji	Jumlah Test Positif	Laboratorium Penguji
1	Avian Influenza	PCR	1	Balai Veteriner Bukittinggi
2	Rabies	FAT	0	sda
3	Jembrana	PCR	0	sda
4	Brucellosis	RBT	0	
5	Parasit Darah	Uji Parasit Darah	35	sda
6	Hog Cholera	PCR	0	sda
7	PRSS	PCR	0	sda
8	H1N1	PCR	0	sda
10	ASF	PCR	0	sda

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dn Pertanian Kota Batam

7. Sedangkan untuk penyakit Rabies, saat ini Kota Batam bebas rabies sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 240/Kpts/PD.650/4/2015 tentang Pernyataan Provinsi Kepulauan Riau Bebas Dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).
8. Terkait dengan kondisi kesehatan mayarakat veteriner terutama dalam hal jaminan keamanan pangan dan olahannya yang akan dikonsumsi oleh masyarakat baik di tingkat importir, distributor, pedagang daging di pasar swalayan maupun pasar basah, secara umum kondisi produk asal hewan untuk konsumsi masyarakat Kota Batam secara umum sudah baik penanganannya ditingkat importir, distributor dan retail dan yang masih banyak permasalahann adalh ditingkat penjulan produk asal hewan di kios pasar basah yang belum menerapkan standar sanitasi dan higiene. Adapun

permasalahan yang masih ditemukan pada produk asal hewan yang dijual di pasar basah adalah tingkat cemaran mikroba yan masih tinggi dan penggunaan bahan berbahaya pada produk asal hewan. Hal lain yang perlu masih harus diperbaiki adalah cara penanganan produk asal hewan yang memenuhi standar sanitasi dan higiene, rantai dingin yang belum maksimal . Kondisi tersebut pada umumnya disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan pasca panen oleh para pelaku usaha, belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku usaha dan konsumen serta belum optimalnya penataan sarana dan prasarana pengelolaan pasca panen peternakan dikarenakan masih kurangnya petugas peternakan. Untuk tersedianya produk asal hewan yang memenuhi kaidah aman, sehat, utuh dan halal di Kota Batam perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dari instansi terkait secara berkesinambungan dan bersinergi yaitu bekerjasama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam , Dinas Pasar, Disperindag, Kepolisian dan BP POM.

Tabel 3.32 Jenis Pengujian Laboratorium pada Produk Asal Hewan yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam bekerjasama dengan Balai Veteriner Bukittinggi dan BPMSPH Bogor Tahun 2021

No	Jenis Uji Laboratorium	Hasil Uji	Jenis Sampel	Laboratorium Penguji
1	Mikrobiologi/Cemaran Mikroba	< BMCM dan >BMCM	Daging Sapi, Daging Ayam, Hati Sapi dan telur ayam	Balai Veteriner Bukittinggi dan BPMSPH Bogor
2	Formalin	Negatif		
3	Residu Antibiotika	Tetracycline, Penicilin dan Tylosin		
4	Hormon	Negatif		
5	Logam Berat	Negatif		

3.5.2.3 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pada umumnya pengolahan hasil peternakan dilaksanakan oleh para pelaku usaha, kelompok usaha pengolahan hasil peternakan, usaha pengolahan hasil ternak di tingkat industri rumah tangga, dengan sarana prasarana yang konvensional dan semi modern. Jenis olahan tersebut berupa olahan daging ayam, daging sapi, dan telur serta susu olahan. Produk olahan tersebut seperti: bakso ayam, abon, nugget ayam, sosis ayam, siomay ayam, bakso daging, dendeng, susu kambing segar, yoghurt dan lain lain.

Untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil produksi olahan hasil peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam bekerjasama dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Jakarta dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor melaksanakan Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan dengan peserta kelompok perwakilan wanita / PKK kecamatan atau masyarakat yang berasal kepada kelompok wanita/ masyarakat di 12 Kecamatan di Kota Batam. Pelatihan ini bertujuan : meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta melatih kelompok wanita untuk bisa mandiri dalam rangka pengolahan produk peternakan yang dihasilkan dan juga meningkatkan jumlah dan jenis produk hasil peternakan yang dipasarkan serta tersebarnya teknologi pengolahan hasil peternakan kepada masyarakat. Materi Pelatihan meliputi: diversifikasi olahan pangan asal hewan yaitu pembuatan aneka makanan olahan yang berasal dari ayam (nugget, rollade, chicken katsu, siomay, chicken wing, sempol ayam) dan olahan susu (kefir, yoghurt dan keju).

Disamping itu pada tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam telah memberikan bantuan fasilitas peralatan Pengolahan Hasil Peternakan kepada dua Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Peternakan. Diharapkan ke depannya dibidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adanya dukungan anggaran untuk dapat memberikan fasilitasi peralatan pengolahan dan packaging / sarana produksi dan pembinaan bagi kelompok usaha pengolahan hasil peternakan, serta up grading kios di pasar pasar.

Untuk memperoleh informasi harga komoditi peternakan dari beberapa tempat pemasaran dan produsen, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) melakukan pengambilan data harga komoditi peternakan yang diolah guna diinformasikan kepada masyarakat konsumen sehingga data tersebut menjadi salah satu pendorong bagi pelaku usaha di bidang peternakan dalam menjalankan usahanya. Harga komoditi peternakan dapat dilihat pada Tabel 3.31

Tabel 3.33. Harga Komoditi Bidang Peternakan di Kota Batam

No	Jenis Komoditi	Satuan	Harga di Tingkat		
			Produsen/ Peternak	Grosir/ Pengumpul	Konsumen
1	2	3	4	5	6
I	**Ternak**				
	Sapi Potong	Kg /brt Hidup		65.000	
	Sapi Bibit (berat ….kg)				
	- Jantan	Ekor		16.000.000 s/d 30.000.000	
	- Betina	Ekor		15.000.000 s/d 20.000.000	
	Kerbau	Kg /brt Hidup		-	
	Kambing/Domba	Kg /brt Hidup		85.000	
	Kambing Bibit (berat kg)				
	- Jantan	Ekor		1.800.000 s/d 3.000.000	
	- Betina	Ekor		1.000.000 s/d 1.200.000	
	Babi Potong	Kg /brt Hidup	64.000	68.000-70000	85.000
	Babi Bibit (berat ….kg)	Ekor	1.000.000	1.500.000	
	Ayam Buras/Kampung (Hidup)	Kg/Ekor	45.000	55.000	70.000
	Ayam Ras/Broiler	Kg/brt Hidup	20.000 - 27.000	23.000 - 30.000	
	DOC Layer	Ekor	9.000	9.500	
	DOC Broiler	Ekor	9.000	9.500	
	DOD (Day Old Duck)	Ekor	9.000	9.500	
II	**Hasil Ternak**				
	Daging Ayam Broiler	Kg			30.000-38.000
	Daging Ayam Broiler (Beku)	Kg			28.000-32.000

	Daging Sapi Has	Kg			150.000
	Daging Sapi Murni	Kg			130.000
	Daging Sapi Beku	Kg			83.000-85.000
	Hati Sapi	Kg			80.000
	Daging Kambing/Domba	Kg			130.000-150.000
	Daging babi	Kg			70.000-85.000
	Telur Ayam Ras	Butir		900-1.100	1.300-1.600
	Telur Ayam Kampung	Butir		2.000	2.000-2.500
	Telur Itik	Butir		2.500	3.000
	Susu Segar	Liter			-
	Kulit Sapi	Kg			-
	Kulit Kerbau	Kg			-
	Kulit Kambing	Lembar			-
III	**Pakan Unggas**				
	Pakan Broiler Starter	Kg			12.000 - 13.000
	Pakan Broiler Grower	Kg			12.000 - 13.000
	Pakan Broiler Finisher	Kg			12.000 - 13.000
	Pakan Layer Stater	Kg			12.000 - 13.000
	Pakan Layer Grower	Kg			12.000 - 13.000
	Pakan Layer Finisher	Kg			12.000 -

					13.000
	Pakan Konsentrat Unggas	Kg			-
IV	**Bahan Baku Pakan**				
	Jagung Kasar/Pipilan	Kg			6.000
	Jagung Halus/Giling	Kg			11.000
	Dedak/Bekatul	Kg			-

Sumber : Dinas KP2K Kota Batam (Data bulan Desember 2020)

3.5.2.4 UPTD. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagai unit pelayanan kesehatan hewan terpadu memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Kota Batam.

Puskeswan Pemerintah Kota Batam berlokasi di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Jl. Raja Haji No. 3 Sekupang, Batam, mulai melaksanakan kegiatannya sejak tahun 2012, dan telah disahkan menjadi UPTD berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, merupakan unit pelaksana teknis daerah yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, UPTD. Puskeswan Pemerintah Kota Batam mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

TUGAS :

1. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan
2. Melaksanakan konsultasi kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan
3. Memberikan surat keterangan dokter hewan

FUNGSI:

1. Menyelenggarakan penyehatan hewan
2. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner
3. Pelaksanaan epidemiologi
4. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiapsiagaan darurat wabah
5. Pemberian jasa pelayanan veteriner

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 jo. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terhitung sejak tanggal 2 November 2020 pelayanan penerbitan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Rekomendasi Pengeluaran Produk Asal Hewan (PAH) dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP yang bertempat di Mall Pelayanan Publik, Gedung Sumatera Convention Centre Batam Centre.

Sesuai dengan SOP dan SPP tentang penerbitan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan/ atau PAH, sebelumnya harus dilaksanakan pemeriksaan hewan dan/ atau sampel PAH yang akan dilalulintaskan / dikeluarkan dari Kota Batam yang dilaksanakan di Puskeswan Pemko Batam Jl. Raja Haji No. 3 Sekupang, dengan mengeluarkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) atau

Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan (SKPAH) sebagai bukti pemeriksaan hewan dan / atau PAH.

Mulai tanggal 11 Januari 2021 sudah dilaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan. Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan hewan dilakukan secara Non Tunai (dapat menggunakan kartu BRIZZI, Mesin EDC, Kartu Debit BRI atau Bank Lainnya, QRIS) dan langsung masuk ke rekening kas daerah Pemerintah Kota Batam.

Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan yang dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan dilaksanakan di UPTD. Puskeswan Pemerintah Kota Batam antara lain :

a. Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Sampel PAH dalam rangka mobilisasi dalam kota dan ke luar Kota Batam serta penerbitan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) atau Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan (SKPAH).

b. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan yang dapat dilaksanakan UPTD. Puskeswan saat ini antara lain :

    1) Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan hewan dan ternak
    2) Pengobatan hewan kesayangan dan ternak;
    3) Vaksinasi hewan kesayangan (anjing dan kucing);
    4) Bedah ringan hewan kesayangan;
    5) Kunjungan ke Peternakan atau Lokasi.

3.5.2.5 UPTD. Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas (RPH-RPU)

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan :

a. Pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);

b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit *zoonotik* ke manusia;

c. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan *zoonosis* yang ditemukan pada pemerikasaan *ante-mortem* dan pemerikasaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong serta mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat, untuk itu Pemerintah daerah kabupaten/ kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.

Pemerintah Kota Batam telah membentuk unit pelayanan rumah pemotongan hewan berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2018 tentang Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang telah beroperasional mulai Bulan Maret 2019.

Saat ini UPTD RPH-RPU Pemeritah Kota Batam mempunyai 2 buah gedung mandiri, yaitu :

a. **Komplek Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)** seluas ± 0,2 Ha, dapat melayani pemotongan hewan / ternak sapi / kerbau sampai dengan 20 / hari, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan - Sei Temiang (Komplek Agribisnis BP) Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang.

b. **Komplek Rumah Potong Unggas (RPU)** seluas ± 0,5 Ha dengan kapasitas pemotongan ± 3000 ekor unggas / hari, yang beralamat di Sei. Pak Mat Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang.

" Terselenggaranya Pelayanan Pemotongan Hewan yang Menghasilkan Produk Hewani yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) bagi Masyarakat Kota Batam"

1. Memberikan pelayanan pemotongan hewan secara professional
2. Memberikan jaminan produk hewani yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
3. Mendorong peningkatan produksi daging ASUH guna meningkatkan ketahanan pangan asal hewan.

4. Menciptakan lingkungan yang bebas polusi dengan penanganan limbah yang baik

5. Meningkatkan kompentensi dan sumber daya manusia

MOTTO

“Produk Daging ASUH, Masyarakat SEHAT ”

Berdasarkan SOP dan SPP tentang Pelayanan Rumah Potong Hewan (Ruminasia) dan Pelayanan Rumah Potong Unggas, jam operasional pemotongan terbuka 24 jam selama 7 hari atau sesuai dengan permintaan pengguna jasa, adapun dokumen yang dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan berupa Hasil Pemerikasaan Antermortem – Postmorte, Surat Jalan Daging dan Bukti Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Potong.

JENIS PELAYANAN YANG DI BERIKAN

1. Pelayanan pemotongan hewan oleh Juleha (Juru Sembelih Halal) bersertifikat
2. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*antemortem)*
3. Pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong (*postmortem)*
4. Penitipan ternak di kandang RPH

Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan mengacu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu

Mulai tanggal 11 Januari 2021 sudah dilaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan. Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan hewan dilakukan secara Non Tunai (dapat menggunakan kartu BRIZZI, Mesin EDC, Kartu Debit BRI atau Bank Lainnya, QRIS) dan langsung masuk ke rekening kas daerah Pemerintah Kota Batam.

Untuk saat ini Rumah Potong Hewan Ruminasia yang beroperasional beriring dengan upaya melengkapi sarana prasarana RPH yang memenuhi SNI 01-6159-1999 tentang Rumah Potong Hewan Ruminasia dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant), Sedangkan Rumah Potong Unggas belum beroperasional terkait pemenuhan Sumber Daya Manusia dan sarana peralatan dan prasarana yang belum dapat difungsikan.

3.5.3 Bidang Ketahanan Pangan

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk pada tahun 2021 di tingkat rumah tangga (menurut SUSENAS tahun 2020) dengan aplikasi baru yaitu Harmonisasi Analisis PPH Berdasarkan Data Susenas yang digunakan untuk AKE 2150 Kkal/Kap/hari. Kualitas konsumsi pangan penduduk (berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2020 sebesar 80.39

Berdasarkan kecukupan energi yang mengacu pada AKG penyesuaian dalam WNPG X Tahun 2012, dan telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2013 sebesar 2.150 kkal/kap/hari, maka Gambaran situasi konsumsi energi

penduduk tahun 2021 yaitu sebesar 2866 kkal/kap/hari atau 130.3% AKE dengan skor PPH sebesar 80.39

Kondisi aktual di Kota Batam tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan di Kota Batam dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor. Jika dilihat dari sumbangan energi dan proteinnya, kelompok pangan nabati memberikan porsi sumbangan dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok pangan hewani. Ketersediaan energi dan protein perkapita pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini.

Tabel 3.34. Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH ketersediaan tahun 2021

Tahun	Energi (Kalori/Hari)			Protein (Gram/Hari)			Skor PPH Ketersediaan
	Total	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	
2020	2.866	2506	360	89.14	57.07	32.07	80.39

Sumber Data:
NBM Kota batam Angka Tetap 2020 (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau)

Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2015 menunjukkan skor 92.49 yang artinya sudah menunjukkan keberagaman yang ideal dan memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan.

Tabel. 3.35 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2021 (ATAP 2021)

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	1,764	80.2	0.5	40.1	25.0	25.0	
2.	Umbi-umbian	59	2.7	0.5	1.3	1.3	2.5	
3.	Pangan Hewani	341	15.5	2.0	31.0	24.0	24.0	
4.	Minyak dan Lemak	453	20.6	0.5	10.3	5.0	5.0	
5.	Buah/biji berminyak	5	0.2	0.5	0.1	0.1	1.0	
6.	Kacang-kacangan	96	4.4	2.0	8.8	8.8	10.0	
7.	Gula	86	3.9	0.5	1.9	1.9	2.5	
8.	Sayuran dan buah	63	2.8	5.0	14.2	14.2	30.0	
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	2,866	130.3		107.8	**80.39**	100.0	

Sumber Data:

NBM Angka Tetap 2021 Kota Batam (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau)

Proporsi energi masing-masing kelompok pangan terhadap total energi yang dikonsumsi menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi penduduk. Pada tahun 2018 konsumsi energi perkapita sebesar 2.125.09 Kkal/kapita/hari sebesar 2.398.54 atau untuk AKE 2.150 kkal/kap/hari sebesar 98.8%, dan pada tahun 2019 sebesar 2.398.54 Kkal/kapita/hari sebesar 111.6%. Sedangkan 2020 untuk AKE 2.150 kkal/kap/hari sebesar 113,1%. Dari segi komposisi (keragaman) tampak sumbangan energi masing-masing kelompok pangan terhadap AKE adalah sebagai berikut :

- **Kelompok Pangan Padi-padian**

Kelompok padi-padian pada tahun 2018 masih mendominasi sumbangan energy yaitu sebesar 1,076.5 Kkal/Kap/hari atau 50.1% AKE, pada tahun 2019 kelompok padi-padian menyumbang energi sebesar 1.260,1 Kkal/Kap/hari atau 58.6% AKE Anjuran konsumsi padi-padian sebesar 50% AKE, dan pada sebesar 1.263 Kkal/Kap/hari atau 58,7%. Anjuran konsumsi padi-padian sebesar 50%, yang berarti sudah melebihi oleh karena itu perlu edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi konsumsi pada kelompok padi-padian dngan mengoptimalkan potensi local.

- **Kelompok umbi-umbian**

Kelompok umbi-umbian pada tahun 2018, menyumbangkan energy sebesar 49.3 Kkal/kap/hari atau sebesar 2,3%AKE sedangkan pada tahun 2019 kelompok umbi-umbian menyumbang energi sebesar 34,5 Kkal/Kap/hari atau 1,6% AKE dan Kelompok umbi-umbian pada tahun 2020, menyumbangkan energy sebesar 43 Kkal/kap/hari atau sebesar 2,0% ada kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara anjuran konsumsi umbi-umbian sebesar 6,0 %, yang berarti masih sangat jauh dari anjuran. Untuk itu kerjasama dengan berbagai institusi terkait guna pengembangan teknologi pengolahan dan pengembangan resep serta sosialisasi konsumsi pangan B2SA perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian

- **Kelompok pangan hewani**

Kelompok pangan hewani pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 378.9 Kkal/kap/hari atau 17.6% AKE, sedangkan pada tahun 2019 kelompok pangan hewani menyumpang energi sebesar 400,3 atau 18,6% AKE dan pada tahun 2020 memberikan

kontribusi energy sebesar 413 Kkal/kap/hari atau 19,2%, dimana proporsi ideal konsumsi kelompok pangan hewani adalah 12 % (melebihi konsumsi ideal).

- **Kelompok Minyak & Lemak**

  Kelompok minyak dan lemak pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 306.6 Kkal/kap/hari atau 14,3%AKE sedangkan pada tahun 2019 kelompok minyak dan lemak menyumbang energi sebesar 355 Kkal/kap/hari atau 16,5% AKE dan Kelompok minyak dan lemak pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy sebesar 367 Kkal/kap/hari atau 17,1% jika dibandingkan angka ideal yaitu 10 % AKE, maka konsumsi minyak dan lemak harus diturunkan.

- **Kelompok buah/biji berminyak**

  Kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy 34 Kkal/kap/hari atau 1.6% AKE, sedangkan pada tahun 2019 kelompok buah/biji berminyak menyumbang energi sebesar 31,9 Kkal/kap/hari atau 1,5% AKE dan Kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy 30 Kkal/kap/hari atau 1.4% AKE dimana untuk konsumsi yang dianjurkan sebesar 3,0% AKE, oleh karena itu konsumsi buah biji berminyak perlu ditingkatkan.

- **Kelompok kacang-kacangan**

  Kelompok kacang-kacangan pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 50.9 Kkal/Kap/hari atau 2.4% AKE sedangkan pada tahun 2019 kelompok kacang-kacanganmenyumbang energi sebesar 46,8 Kkal/kap/hari atau 2,4%AKE, dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy sebesar 51 Kkal/Kap/hari atau 2.4% AKE dimana masih harus ditingkatkan karena untuk idealnya harus 5 % AKE.

- **Kelompok Pangan gula**

Kelompok pangan gula pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 95.5 Kkal/Kap/hari atau 4.4% AKE, sedangkan pada tahun 2019 kelompok pangan gula menyumbang energi sebesar 93,3 Kkal/kap/hari atau 4,3% AKE dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy sebesar 76 Kkal/Kap/hari atau 3,6% AKE, dimana masih harus diturunkan karena untuk idealnya harus 5% AKE.

- **Kelompok sayur dan buah**

Kelompok sayur dan buah pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 101.5 Kkal/Kap/hari atau 4.7% AKE, sedangkan pada tahun 2019 kelompok sayur dan buah menyumbang energi sebesar 125,6 Kkal/kap/hari atau 5,8% pada tahun 2019 memberikan kontribusi energy sebesar 129 Kkal/Kap/hari atau 6,0% AKE sudah ideal, dimana masih harus ditingkatkan karena untuk idealnya harus 6% AKE.

Dengan demikian, untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat agar menuju kondisi beragam, bergizi, dan berimbang, maka upaya peningkatan konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta sayuran dan buah. Selain itu diupayakan penurunan konsumsi padi-padian, pangan hewani,minyak dan lemak. Dibandingkan dengan proporsi harapannya, kualitas konsumsi pangan untuk semua wilayah masih perlu mendapat perhatian serius, terutama untuk konsumsi kelompok umbi-umbian (perlu ditingkatkan 4%), kelompok buah/biji berminyak (perlu ditingkatkan 1,6%), kacang-kacangan (perlu ditingkatkan antara 2,6%).

1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk

Bila dilihat per kelompok pangan, situasi konsumsi pangan penduduk Kota Batam tahun 2020 (Tabel 5 dan 6) sebagai berikut:

a. Kelompok Pangan Padi-padian

Kelompok pangan padi-padian di Kota Batam tahun 2020 sebesar 313,4gram/kap/hari diatas angka anjuran kecukupan konsumsi padi-

padian sebesar 275 gram/kap/hari (116 kg/kapita/tahun); maka konsumsi padi-padian harus dinaikkan sebesar 38.4 gram/kapita/hari.

Bila ditelaah lebih lanjut per jenis pangan, kenaikan konsumsi beras berasal dari beras yang dimasak di rumah tangga , beras yang dikonsumsi diluar rumah tangga/beras dari makanan jadi (kue basah, nasi rames dan lontong/ketupat sayur, demikian juga beras yang berasal dari olahan pabrik (bubur bayi kemasan).

b. Kelompok Pangan Umbi-umbian

Kelompok pangan umbi-umbian tahun 2020 sebesar 43,4gram/kapita/hari (15.8 kg/kapita/tahun). Bila dibandingkan dengan angka anjuran kecukupan konsumsi umbi-umbian sebesar 100 gram/kap/hari;

c. Kelompok Pangan Hewani

Konsumsi kelompok pangan sumber protein hewani (pangan hewani) pada tahun 2020 sebesar 210,7 gram/kapita/hari atau 76,9 Kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan angka anjuran kecukupan konsumsi pangan hewani sebesar 150 gram/kap/hari, konsumsi pangan hewani perlu diturunkan sebesar 60,7 gram/kapita/hari.

d. Kelompok Pangan Minyak dan Lemak

Konsumsi kelompok pangan minyak dan lemak pada tahun 2020 sebesar 41,2 gr/kap/hr atau 15,0 kg/kapita/tahun. Anjuran 20 gram/kapita/hari, maka kondisi ini perlu diturunkan.

e. Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak

Konsumsi Kelompok pangan buah/biji berminyak pada tahun 2020 yaitu 5,4 gram/kapita/hari atau 2,0 kg/kapita/tahun. Pada kelompok ini konsumsi yang dianjurkan sebesar 3.9 gram/kap/hari atau perlu dinaikkan 1,5 gram/kapita/hari.

f. Kelompok Pangan Kacang-kacangan

Konsumsi Kelompok pangan kacang-kacangan pada tahun 2020 yaitu 21.5 gram/kapita/hari atau 7.9 kg/kapita/tahun. Pada kelompok ini konsumsi yang dianjurkan sebesar 35 gram/kap/hari atau perlu dinaikkan 13.5 gram/kapita/hari, oleh karena itu kecukupan konsumsi kelompok kacang-kacangan perlu ditingkatkan.

g. Kelompok Pangan Gula

Konsumsi Kelompok pangan gula pada tahun 2020 yaitu 20,2 gram/kapita/hari atau 7,4 kg/kapita/tahun. Pada kelompok ini konsumsi yang dianjurkan sebesar 30 gram/kap/hari atau perlu dinaikkan 9,8 gram/kapita/hari, oleh karena itu kecukupan konsumsi kelompok gula perlu ditingkatkan.

h. Kelompok pangan Sayur dan Buah

Konsumsi Kelompok sayur dan buah pada tahun 2020 yaitu 290 gram/kapita/hari atau 105,8 kg/kapita/tahun. Pada kelompok ini konsumsi yang dianjurkan sebesar 250 gram/kap/hari atau perlu diturunkan 40 gram/kapita/hari.

2. Cadangan Pangan Masyarakat

Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat di Kota Batam yaitu dengan menggunakan alokasi Anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 dengan membangun lumbung pangan masyarakat yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok melalui dana Bansos.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk: (a) meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat karena produksi tidak merata sepanjang tahun; (b) menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan dan (3) sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi darurat. Saat ini Kota batam baru memiliki 1 (satu) lumbung pangan di Pulau Mecan Kec. Belakang Padang. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2017 direncanakan akan membemberikan bantuan cadangan pangan masyarakat di 3 (tiga) Pulau Hinterland.

3. Pangan Segar Aman Konsumsi

Pangan Segar Aman Konsumsi adalah salah satu indikator keamanan pangan yang menggambarkan kinerja Dinas dalam melayani masyarakat terhadap ketersediaan pangan yang aman dan layak dikonsumsi.

Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut kepedulian individu. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya jika tidak aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya sama sekali. Keamanan Pangan

diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam hal ini Bidang Ketahan Pangan khusus nya seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan melakukan Pengambilan dan pengujian sampel buah segar di di pasar tradisional dan distributor. Sasaran dalam pelaksanaan pengawasan sayur ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pangan yang akan dikonsumsi khususnya pangan segar harus aman dan bebas dari pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomer : 53/Permentan /KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Uji keamanan pangan dilakukan terhadap komoditas yang diduga mengandung pestisida, formalin dan boraks. Pengambilan sampel hanya dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu pasar Sei Harapan, Tiban Centre dan Aviari. Target sampel yang diuji adalah sebanyak 71 (Tujuh Puluh satu) sampel. Pada tahun 2018, sampel yang diuji sebanyak 71 Tujuh Puluh satu) samp el. sampel mengandung pestisida sebanyak 5 (Lima) buah atau 92.96% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji.

Pada 2019 Target sampel yang diuji adalah sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) sampel. sampel yang diuji sebanyak 56 Tujuh Puluh satu) sampel. Dari 56 Sampel yang di uji laboratorium tidak ditemukan Mengadung Bahan berbahaya dapat dikatakan 100% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji. Untuk tahun 2020 Pengujian sampel dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan parameter yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.36Metode dan parameter pengujian sampel.

No	Parameter	Testing Method
1.	Residues Of Organocholorine Pesticide	GC (Gas Cromatography)
2.	Residues Of Organophospphate Pesticide	GC (Gas Cromatography)
3.	Residues Of Pyretroid Pesticide	GC (Gas Cromatography)
4.	Residues Of Carbamate Pesticide	LC MS MS (Liquid chromatography-mass spectrometry)
5.	Residues Of Other Pesticide	LC MS MS (Liquid chromatography-mass spectrometry)
6.	Heavy Metal	AAS (Atomic Absorption Spectrometer)
7.	Microbial Contaminant (Escherichia coli)	ISO 7251:2005
8.	Microbial Contaminant (Salmonella sp)	ISO 6579 :2002

Pada Tahun 2020, target sampel yang diuji sebanyak 12 (dua belas) sampel dan dilakukan pengujian di Laboratorium PT. Mutu Agung Lestari yang beralamat di Jalan raya Bogor KM 33.5 No. 19 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil dari pengujian yaitu semua sampel dinyatakan negatif baik kandungan pestisida, logam berat maupun mikroba (salmonella sp dan escherichia coli) (dibawah BMR) artinya aman untuk di Konsumsi.

Jadi hasil uji 100% aman untuk di konsumsi dari target 90% aman konsumsi.

4. **Ketersediaan Pangan Utama (kg / 1.000 orang**)

Salah satu indikator untuk mengetahui ketersediaan pangan utama adalah dengan melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Ketersediaan energi pada tahun 2018 yaitu 3,308 Kkal/Kap/hari sedangkan ketersediaan protein 70.12 gram/kapita/hari diatas rekomendasi WNPG X Tahun 2012. Ketersediaan pangan utama tahun 2017 sebesar 129.889 (kg/1000 orang) atau 126.11% dari target yang ditetapkan (103.000 kg/1000 orang). Ketersediaan pangan utama tahun 2018 sebesar 97.135 (kg/1000 orang) atau 93.40% dari target yang ditetapkan (104.000 kg/1000 orang). Ketersediaan pangan utama tahun 2019 sebesar 108.460 (kg/1000 orang) atau 93.40% dari target yang ditetapkan (105.000 kg/1000 orang). Ketersediaan pangan utama tahun 2020 sebesar 108,458 (kg/1000 orang) atau 93.40% dari target yang ditetapkan (105,000 kg/1000 orang)

Gambar 3.14 Ketersediaan Pangan Utama dari tahun 2017 s,d 2020

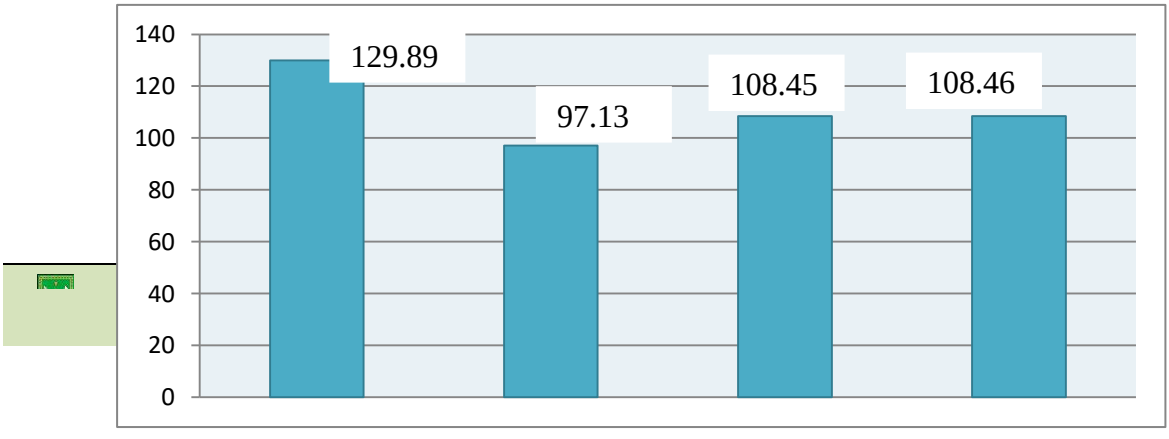

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Batam, Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian selama kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan mempunyai tujuan sebagai berikut :

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut: **Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam.**

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)
2. Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan
3. Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86.9	87.2	87.6	87.9	88.2	88.5
		Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	Persentase Peningkatan Pangan Segar Aman Konsumsi	85	86	87	88	89	90
			Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	152	152.2	152.4	152.6	152.8	153
		Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	3.0	3.5	4	4	4	4
			Persentase peningkatan produksi ternak sapi	8	16	21	18	22	20
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	75	80	85	90	95	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Batam Tahun 2021 – 2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai , tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program.

5.1. STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat
2. Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian yang unggul sehingga masyarakat dapat manfaat nilai ekonomis, ekologis dan estetika dari usaha yang dilaksanakannya
4. Meningkatkan promosi pemasaran produk pertanian
5. Meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian yang beredar di Kota Batam
6. Meningkatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan dan ternak, serta pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman
2. Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing
3. Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui urban farming.
4. Memfasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian dan hasil olahannya
5. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian dan peternakan yang beredar di Kota Batam
6. Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis

serta meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium kesehatan hewan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Visi RPJMD: Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera".			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam	Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat	Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman
	Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan	Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar	Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian yang unggul sehingga masyarakat dapat manfaat nilai ekonomis, ekologis dan estetika dari usaha yang dilaksanakannya	Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui urban farming.
		Meningkatkan promosi pemasaran produk pertanian	Memfasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian dan hasil olahannya
		Meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian yang beredar di Kota Batam	Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian dan peternakan yang beredar di Kota Batam

Visi RPJMD: Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera".			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia			
	Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis**.**	Meningkatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan dan ternak, serta pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis serta meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium kesehatan hewan

`

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

6.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

C. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

`

6.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

A. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pembangunan Prasarana Pertanian

C. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

D. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam									Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan didasarkan pada sumbangan energi dari kelompokpangan utama pada tingkat ketersediaan maupun tk konsumsi sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Semakin Tinggi Skor PPH (100) maka semakin beragam	Jika Score AKE > Skor Maks Maka Score PPH adalah Score yang digunakan Score Maks, Sebaliknya Jika Score AKE< Score Maks maka Score PPH yang digunakan adalah Score AKE		86,9		87,2		87,6		87,9		88,2		88,5		88,5		DKPP	Kota Batam
	Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan								Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	Ketersediaan Beras (pangan utama) yang tersedia di Kota Batam per kg/kapita/tahun	Jumlah Beras yang tersedia di Kota Batam (ton)/tahun di bagi dengan jumlah penduduk x 1000		152		152.2		152.4		152.6		152.8		153.0		153.0		DKPP	Kota Batam
		2													14,723,659,701		17,932,649,718		21290348289		22078641795		24,356,835,879		25912558406		126,294,693,787	DKPP	Kota Batam
		2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Tetap							10,086,096,195		12,359,339,156		12,945,964,788		12,978,870,539		14,245,945,880		14,757,095,607		77,373,312,165	DKPP	Kota Batam
		2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tetap	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Penunjang urusan pemerintahan daerah adalah program kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase dari cakupan pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	9,265,857,195	100%	11,121,645,956	100%	11,121,645,957	100%	11,121,645,957	100%	12,353,399,711	100%	12,826,534,920	100%	67,810,729,696	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tetap	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan Pejabat Pengadaanperubahannya	Persentase terpenuhinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan Pejabat Pengadaan	100%	100%	6,993,183,764	100%	8,695,546,388	100%	8,612,088,564	100%	8,612,088,564	100%	9,747,726,270	100%	10,121,064,186	100%	52,781,697,735	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tetap	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN adalah PNS dan PPPK yang bekerja Di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan setiap bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	6,938,403,764	40Orang/Bulan	8,689,886,388	41 Orang/Bulan	8,606,233,860	41 Orang/Bulan	8,606,233,860	41 Orang/Bulan	9,741,647,331	41 Orang/Bulan	10,114,752,423	41 Orang/Bulan	52,697,157,625	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tetap	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen yang dimaksud adalah dokumen SPJ per sub kegiatan yang di diverifikasit dan ata usahakan dalam 1 tahun	Jumlah bulan Laporan pada Dokumen DPA Dinas kependudukan dan Pencatan Sipil yang dilaksanakan dalam 1 tahun	12 Dokumen	12 Dokumen	54,780,000	12 Dokumen	5,660,000	12 Dokumen	5,854,704	12 Dokumen	5,854,704	12 Dokumen	6,078,939	12 Dokumen	6,311,763	12 Dokumen	84,540,110	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tetap	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	241,789,500	100%	239,680,568	100%	247,925,580	100%	247,925,580	100%	257,421,129	100%	267,280,358	100%	1,502,022,715	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tetap	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket adalah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,630,000	1 Paket	8,269,000	1 Paket	8,553,454	1 Paket	8,553,454	1 Paket	8,881,051	1 Paket	9,221,195	1 Paket	51,108,153	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tetap	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket adalah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	91,454,000	5 Paket	100,205,068	5 Paket	103,652,122	5 Paket	103,652,122	5 Paket	107,621,999	5 Paket	111,743,921	5 Paket	618,329,232	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tetap	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Logistik Kantor berupa Bahan bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional	Jumlah kendaraan operasional yang ditanggung BBMnya	4 Unit	4 Unit	27,871,500															
		2	09	01	02.01	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tetap	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket adalah paket pengadaan/belanja yang dilaksanakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21,860,000	1 Paket	19,282,500	1 Paket	19,945,818	1 Paket	19,945,818	1 Paket	20,709,743	1 Paket	21,502,926	1 Paket	123,246,805	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tetap	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah Media Surat Kabar Lokal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3,600,000	2 Dokumen	3,600,000	2 Dokumen	3,723,840	2 Dokumen	3,723,840	2 Dokumen	3,866,463	2 Dokumen	4,014,549	2 Dokumen	22,528,692	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tetap	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi adalah pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	89,374,000	1 Laporan	108,324,000	1 Laporan	112,050,346	1 Laporan	112,050,346	1 Laporan	116,341,874	1 Laporan	120,797,768	1 Laporan	658,938,333	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01		Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tetap	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Yang tecantum dalam RKBMD dalam 1 tahun	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dipelihara berdasarkan RKBMD dalam 1 Tahun	100%	100%	125,370,000	100%	265,505,000	100%	274,638,372	100%	274,638,372	100%	285,157,022	100%	296,078,536	100%	1,521,387,301	DKPP	Kota Batam

		2	09	01	02.01	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tetap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	125,370,000	10 Unit	265,505,000	10 Unit	274,638,372	10 Unit	274,638,372	10 Unit	285,157,022	10 Unit	296,078,536	10 Unit	1,521,387,301	DKPP	Kota Batam
		2	9	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Penyediaan Air, Listrik, Internat dan THL	Persentase Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan THL dalam 1 Tahun	100	100	1,580,370,240	100	1,586,744,000	100	1,641,327,994	100	1,641,327,994	100	1,704,190,856	100	1,769,461,366	100	9,923,422,448	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tetap	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Belanja Tagihan Telepon, Internet, Air, dan PLN	Jumlah Laporan Belanja Tagihan Telepon, Internet, Air, dan PLN dalam 1 tahun	1 Laporan	1 Laporan	196,927,200	1 Laporan	216,144,000	1 Laporan	223,579,354	1 Laporan	223,579,354	1 Laporan	232,142,443	1 Laporan	241,033,498	1 Laporan	1,333,405,848	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tetap	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan adalah laporan pembayaran honorarium Tenaga Adminstrasi/Kontrak pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi/Kontrak dalam 1 tahun	1 Laporan	1 Laporan	1,383,443,040	1 Laporan	1,370,600,000	1 Laporan	1,417,748,640	1 Laporan	1,417,748,640	1 Laporan	1,472,048,413	1 Laporan	1,528,427,867	1 Laporan	8,590,016,600	DKPP	Kota Batam
		2	9	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional, Peralatan elektronik dan Kantor Dinas yang tercatat dalam Aset K DKPP	Persentase dari cakupan pelaksanaan Sub-sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	325,143,691	1 Tahun	334,170,000	100%	345,665,448.00	100%	345,665,448.00	100%	358,904,435.00	100%	372,650,475.00	100%	2,082,199,496.00	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tetap	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kendaraan Operasional yang ditanggung biaya Pajak, BBM dan Service/Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan operasional yang ditanggung biaya Pajak, BBM dan Servicenya dalam satu tahun	3 unit	3 unit	104,422,200	3 unit	104,980,000	3 unit	108,591,312	3 unit	108,591,312	3 unit	112,750,359	3 unit	117,068,698	3 unit	656,403,881		
		2	09	01	02.01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tetap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara yang tercatat pada Aset Tetap DKPP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dala satu tahun	20 Unit	20 Unit	19,500,000	20 Unit	20,800,000	20 Unit	21,515,520	20 Unit	21,515,520	20 Unit	22,339,564	20 Unit	23,195,170	20 Unit	128,865,774	DKPP	Kota Batam
		2	09	01	02.01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tetap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah Kantor DKPP	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satu tahun	2 Unit	2 Unit	201,221,491	2 Unit	208,390,000	2 Unit	215,558,616	2 Unit	215,558,616	2 Unit	223,814,511	2 Unit	232,386,607	2 Unit	1,296,929,841	DKPP	Kota Batam
		2	9	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tetap	Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)	Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi adalah ketersediaan bahan makanan secara keseluruhan, tingkat kecukupannya menurut kebutuhan gizi	Ketersediaan Beras/Kapita/100) X (Bahan yang dapat dimakan/100)Xkalori	2604	2605	519,062,000	2,606	931,781,700	2,607	1,507,883,976	2,608	1,529,524,645	2,609	1,552,754,105	2,610	1,577,754,587	2,610	7,618,761,013	DKPP	Kota Batam
		2	9	03	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	Jumlah Pangan utama Masyarakat	Kebutuhan Pangan utama Masyarakat adalah beras per Individu Kg/kapita/tahun	Ketersedian Pangan (Penyediaan dalam Negeri - Pakan - bibit-tercecer-Penggunaan Lain)(Kg/Kapita/Hari) = Penyediaan dalam negeri dibagi jumlah penduduk dikali 100	151.83	152	-	152.20	238,160,830	152	246,353,563	153	255,123,749	153	264,537,816	153	274,669,614	153	1,278,845,572	DKPP	Kota Batam
		2	09	03	02.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Informasi harga pangan dan NBM	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	171,190,860	1 Laporan	177,079,826	1 Laporan	183,383,867	1 Laporan	190,150,732	1 Laporan	197,433,505	1 Laporan	919,238,790	DKPP	Kota Batam
		2	09	03	02.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1. Jumlah frekuensi koordinasi pelaksanaan distribusi pangan dengan instansi terkait 2. Jumlah peserta sosialisasi;	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kebutuhan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	66,969,970	2 Laporan	69,273,737	2 Laporan	71,739,882	2 Laporan	74,387,084	2 Laporan	77,236,109	2 Laporan	359,606,782	DKPP	Kota Batam
		2	9	03	02.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	Cadangan pangan Pemda adalah Pangan yang disediakan berupa Beras untuk keperluan Bantuan Pangan kepada masyarakat dalam menanggulangi Gizi Buruk, Bencana, Penyesuaian Harga BBM	Persentase cadangan pangan pemda kemampuan mengalokasikan Cadangan Beras dibagi 100 Ton dikali 100% dalam satu tahun	0	0	-	25	349,507,360	30	361530413	40	374400896	45	388,216,289	50	403084973	50	1,876,739,931	DKPP	Kota Batam
		2	09	03	02.01	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan Pemda	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kemampuan Pemda dalam mengalokasikan Cadangan pangan Pemda adalah Cadangan Pangan berupa Beras untuk keperluan Bantuan Pangan kepada masyarakat	Jumlah cadangan pangan pemda berupa beras dalam satu tahun	belum ada	0	-	25 ton	349,507,360	30 ton	361,530,413	40 ton	374,400,896	45 ton	388,216,289	50 ton	403,084,973	50 ton	1,876,739,931		
		2	9	03	02.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	Lomba Cipta Menu adalah Perlombaan untuk menciptakan Menu baru dalam rangka penganekaragaman Konsumsi dalam memenuhi Kecukupan Gizi Keluarga	Jumlah Kecamatan yang mengikuti LCM dalam satu tahun	12 kecamatan	12 kecamatan	519,062,000	12 kecamatan	344,113,510	12 kecamatan	900,000,000	12 kecamatan	900,000,000	12 kecamatan	900,000,000	12 kecamatan	900,000,000	12 kecamatan	4,463,175,510	DKPP	Kota Batam
		2	09	03	02.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah peserta yang mengikuti LCM B2SA dan Demo Masak B2SA;	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Melaksanakan Lomba Cipta Menu dan Demo Masak untuk 12 Kecamatan agar dapat memberikan edukasi untuk mengolah bahan makanan yang bermacam-macam untuk pemenuhan Gizi keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Lomba Cipta Menu pada 12 Kecamatan di Kota Batam	1 Laporan	1 Laporan	519,062,000	1 Laporan	344,113,510	1 Laporan	900,000,000	1 Laporan	900,000,000	1 Laporan	900,000,000	1 Laporan	900,000,000	1 Laporan	4,463,175,510	DKPP	Kota Batam

		2	9	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)	Persentase wilayah aman pangan	Wilayah aman pangan adalah Wilayah yang tersedia Pangan berupa Beras tercukupi baik dari Produksi lokal maupun Distribusi dari luar wilayah	Persentase kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%	belum ada	belum ada	301,177,000	55	216,396,440	59	223840478.0	63	231,809,199	66	240362958.00	70	249568859.00	70	1463154933.00		DKPP	Kota Batam
		2	9	04	02.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	Peta kerawanan pangan adalah pemetaan Wilayah berdasarkan ketersedian dan distribusi pangan ke wilayah tersebut	Jumlah dokumen kerawanan pangan Kota Batam X 100%	-	100	131,047,000	100	100,050,410	100	103,492,144	100	107,176,464	100	111,131,276	100	115,387,604	100	668,284,898		DKPP	Kota Batam
		2	09	04	02.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang disusun	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta kerawanan pangan adalah pemetaan Wilayah berdasarkan ketersedian dan distribusi pangan ke wilayh tersebut	Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan dalam satu tahun	belum ada	1 Dokumen	131,047,000	1 Dokumen	100,050,410	1 Dokumen	103,492,144	1 Dokumen	107,176,464	1 Dokumen	111,131,276	1 Dokumen	115,387,604	1 Dokumen	668,284,898		DKPP	Kota Batam
		2	9	04	02.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani	Penanganan wilayah rentan pangan adalah mencari solusi agar wilayah tersebut dari rawan pangan menjadi aman pangan	jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%	0	12.5	170,130,000	9	116,346,030	8	120,348,333	6	124,632,734	3	129,231,682.00	3	134,181,255	3	794,870,035		DKPP	Kota Batam
		2	09	04	02.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi kerawanan pangan yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	koordinasi kerawanan pangan adalah melakukan perjalanan ke Instansi Terkait untuk menangani kerawan pangan	Jumlah laporan dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota dalam satu tahun	2 Laporan	0	-	2 Laporan	43,544,610	2 Laporan	45,042,545	2 Laporan	46,646,059	2 Laporan	48,367,299	2 Laporan	50,219,766	2 Laporan	233,820,279		DKPP	Kota Batam
		2	09	04	02.01	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah rentan pangan yang ditangani (kelurahan)	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah rentan pangan adalah wilayah yang tidak memiliki sumber daya pangan lokal dan jalur distribusi yang sulit untuk dicapai	Jumlah Dokumen Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah ke wilayah rentan pangan	0	1 Dokumen	170,130,000	1 Dokumen	72,801,420	1 Dokumen	75,305,789	1 Dokumen	77,986,675	1 Dokumen	80,864,383	1 Dokumen	83,961,489	1 Dokumen	561,049,756		DKPP	Kota Batam
							Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	Persentase Peningkatan Pangan Segar Aman Konsumsi	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) (jumlah sampel pangan aman yang diuji / sampel pangan yang diuji x 100%)	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan setelah mengalami pengolahan	Persentase hasil uji di Laboratorium terakreditasi dibagi jumlah Sampel yang di uji dikali 100%	0	85		86		87		88		89		90		90		DKPP	Kota Batam
		2	9	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) (jumlah sampel pangan aman yang diuji / sampel pangan yang diuji x 100%)	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan setelah mengalami pengolahan	Persentase hasil uji di Laboratorium terakreditasi dibagi jumlah Sampel yang di uji dikali 100%	100	85	-	86	89,515,060	87	92,594,378	88	95,890,738	89	99,429,106	90	103,237,241	90	480,666,523		DKPP	Kota Batam
		2	9	05	02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab	Sampel Pangan Segar Aman Konsumsi diambil random dari pasar yang ditindaklanjuti/diuji ke Laboraturium	Persentase hasil uji di Laboratorium terakreditasi dibagi jumlah Sampel yang di uji dikali 100%	100	85	-	86	89,515,060	87	92,594,378	88	95,890,738	89	99,429,106	90	103,237,241	90	480,666,523		DKPP	Kota Batam
		2	09	05	02.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah sampel PSAT yang diuji dengan rapid Test; 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji di laboratorium(kimia, mikrobiologi, pestisida)	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota adalah Sertifikat Yang dikeluar Laboratorium berakriditasi yang menyatakan bahwa Pangan asal Tumbuhan mengandung Bahan Kimia, Mirkrobiologi, dan Pestisida dibawah Batas Ambang Residu	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan dalam 1 tahun	12 Sertifikat	12 Sertifikat	-	60 Sertifikat	89,515,060	60 Sertifikat	92,594,378	60 Sertifikat	95,890,738	60 Sertifikat	99,429,106	60 Sertifikat	103,237,241	60 Sertifikat	480,666,523		DKPP	Kota Batam
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4,637,563,506		5,573,310,562		8,344,383,501		9,099,771,256		10,110,889,999		11,155,462,799		48,921,381,623		DKPP	Kota Batam
		3	27				URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSANPEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							4,637,563,506		5,573,310,562		8,344,383,501		9,099,771,256		10,110,889,999		11,155,462,799		48,921,381,623		DKPP	Kota Batam
Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan							Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	peningkatan produksi pertanian Komoditas Palawija dan Hortukultura dalam satu Tahun	produksi pertanian Komoditas Palawija dan Hortukultura tahun berjalan dan tahun lalu x 100%		3		4		4		4		4		4		4		DKPP	Kota Batam
							Persentase peningkatan produksi ternak sapi	Persentase peningkatan produksi ternak sapi	persentase peningkatan produksi peternakan (Ternak Sapi)	persentase peningkatan produksi produksi peternakan (Ternak Sapi)	peningkatan produksi pertanian Populasi Ternak Sapi dalam satu Tahun	Populasi Ternak sapi tahun berjalan dan tahun lalu x 100%		8		16		21		18		22		20		20		DKPP	Kota Batam
		3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	peningkatan produksi pertanian Komoditas Palawija dan Hortukultura dalam satu Tahun	produksi pertanian Komoditas Palawija dan Hortukultura tahun berjalan dan tahun lalu x 100%	3	3	3,318,630,000	3.5	2,800,152,425	4	5,210,565,355	4	5,744,765,185	4	6,374,241,704	4	7,011,665,874	22.5	30,460,020,543		DKPP	Kota Batam
									Jumlah produksi ternak sapi	Jumlah produksi ternak sapi	Produksi Ternak sapi berasal dari pengadaan sapi dan poenambahan kelahiran pada kegiatan budidaya ternak sapi	Jumlah produksi ternak sapi yang berasal dari Pengadaan dan Kelahiran (penambahan Populasi)	297	132		70		85		95		110		120		505		DKPP	Kota Batam
		3	27	2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Produksi Pertanian yang dihasilkan dari data panen dilapangan dari PPL masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP)	Jumlah produksi pertanian komoditas palawija dan hortikultura dalam satu Tahun dengan satuan Kg	30,309	31,218	1,107,350,000	32,311	1,293,409,400	33,603	2,394,565,355	34,947	2,697,165,185	36,345	2,966,881,704	37,799	3,263,569,874	37,799	13,722,941,518		DKPP	Kota Batam

		3	27	02	02.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang menerima bantuan sarana pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Jumlah Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian adalah sarana produksi Pertanian penunjang kegiatan Budidaya	Jumlah laporan kegiatan pengadaan Sarana Produksi Pertanian dalam 1 Tahun	0	1 Laporan	1,107,350,000	1 Laporan	1,203,891,800	1 Laporan	2,301,968,350	1 Laporan	2,497,165,185	1 Laporan	2,716,881,704	1 Laporan	2,963,569,874	1 Laporan	12,790,826,913	DKPP	Kota Batam
		3	27	02	02.01	03	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Kelompok Tani yang dimonitoring penggunaan sarana yang dibantu	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian adalah kegiatan monitoring terhadap kelompok tani yang mendapat bantuan Saprodi	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	0	-	3 Laporan	89,517,600	3 Laporan	92,597,005	3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	250,000,000	3 Laporan	300,000,000	3 Laporan	932,114,605	DKPP	Kota Batam
		3	27	2	02.01		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Produksi Ternak sapi berasal dari pengadaan sapi dan penambahan kelahiran pada kegiatan budidaya ternak sapi	Jumlah Ternak sapi berasal dari pengadaan sapi dan penambahan kelahiran pada kegiatan budidaya ternak sapi dalam satu tahun	15	15	2,211,280,000	15	1,506,743,025	15	2,816,000,000	15	3,047,600,000	20	3,407,360,000	20	3,748,096,000	105	16,737,079,025	DKPP	Kota Batam
		3	27	02	02.01	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Sapi yang disalurkan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ternak sapi berasal dari pengadaan sapi yang di salurkan kelompok tani/ternak	Jumlah pengadaan hewan ternak sapi di konversi untuk Jantan berat 280 Kg dan Betina 210 Kg	282 Ekor	50 Ekor	2,211,280,000	18 Ton	1,506,743,025	24 Ton	2,816,000,000	24 Ton	3,047,600,000	24 Ton	3,407,360,000	24 Ton	3,748,096,000	114 Ton	16,737,079,025	DKPP	Kota Batam
		3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	produksi karkas sapi dari Pemotongan di RPH	Jumlah produksi karkas sapi Pemotongan di RPH per Tahun Anggaran dalam Tonase	0	226 ton	779,888,995	233.4 ton	823,670,860	256 ton	1,285,000,000	266 ton	1,500,000,000	282 ton	1,750,000,000	292 ton	2,000,000,000	1555 Ton	8,138,559,855	DKPP	Kota Batam
		3	27	3	02.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah RPH yang dipelhara	Jumlah Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH dan RPU	RPH adalah Tempat pemotongan Ternak ruminansia Halal di Kota Batam	jumlah UPTD RPH Kota Batam dipelihara untuk satu tahun	1 Unit	1 Unit	779,888,995	1 Unit	823,670,860	2 Unit	1,285,000,000	2 Unit	1,500,000,000	2 Unit	1,750,000,000	2 Unit	2,000,000,000	2 Unit	8,138,559,855	DKPP	Kota Batam
		3	27	03	02.01	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah sarana dan prasarana RPH yang diadakan dan dipelihara	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	RPH adalah Tempat pemotongan Ternak Ruminansia Halal di Kota Batam	Jumlah Unit UPTD RPH dan RPU Kota Batam	1 Unit	1 Unit	779,888,995	1 Unit	823,670,860	2 Unit	1,285,000,000	2 Unit	1,500,000,000	2 Unit	1,750,000,000	2 Unit	2,000,000,000	2 Unit	8,138,559,855	DKPP	Kota Batam
		3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Kelembagaan Kelompok Tani adalah suatu wadah berkumpulnya masyarakat yang melakukan budidaya dalam skala kecil dengan luas lahan dibawah 2 Ha	Penambahan Jumlah Kelompok Baru dibandingkan dengan Jumlah kelompok lama di kali 100 %	40%	10%	101,320,000	10%	655,064,790	10%	725,000,000	10%	775,000,000	10%	850,000,000	10%	950,000,000	60%	4,056,384,790	DKPP	Kota Batam
		3	27	7	02.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	Persentase Kelompok Tani yang dibina/ dikembangkan	Pelaksanaan Penyuluhan adalah memberikan pembinaan dan pendampingan dalam menjalan proses budidaya dan dinamika kelompok	Jumlah Kelompok Tani yang dibina/ dikembangkan dibagi Jumlah seluruh Kelompok dikali 100%	40%	60%	101,320,000	70%	655,064,790	75%	725,000,000	80%	775,000,000	90%	850,000,000	100%	950,000,000	100%	4,056,384,790	DKPP	Kota Batam
		3	27	07	02.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti diklat/bimtek/magang/de mplot	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah Balai Penyuluh Pertanian tempat pusat informasi dan teknologi budadaya baru dalam penyuluh pertanian	Jumlah BPP di Kota Batam	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	250,006,890	1 Unit	275,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	1,275,006,890	DKPP	Kota Batam
		3	27	07	02.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang dibina/ dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelembagaan Kelompok Tani adalah suatu wadah berkumpulnya masyarakat yang melakukan budidaya dalam skala kecil dengan luas lahan dibawah 2 Ha	Jumlah Kelompok Tani yang dibina dalam satu Tahun Anggaran	60 Unit	5 Unit	101,320,000	12 Unit	405,057,900	12 Unit	450,000,000	12 Unit	475,000,000	12 Unit	500,000,000	12 Unit	550,000,000	12 Unit	2,481,377,900	DKPP	Kota Batam
		3	27	07	02.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen penyusunan programa penyuluhan pertanian yang disusun	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Programa Penyuluh Pertanian adalah Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan Pembinaan dan pendampingan budiadaya pertanian	Jumlah Rencana Kerja Tahunan PPL dalam satu tahun anggaran	0	0	-	10 Unit	-	10 Unit	0	15 Unit	100,000,000	15 Unit	100,000,000	15 Unit	100,000,000	15 Unit	100,000,000	DKPP	Kota Batam
	Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis								Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan adalah wilayah pengawasan terhadapa pengendalian kesehatan Hewan dan veteriner	persentase Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan dibandingkan dengan jumlah Lokasi dan Produk survey di Kota Batam dikali 100%		75		80		85		90		95		100		100		DKPP	Kota Batam
		3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan adalah wilayah pengawasan terhadapa pengendalian kesehatan Hewan dan veteriner	persentase Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan dibandingkan dengan jumlah Lokasi dan Produk survey di Kota Batam dikali 100%	70	75	437,724,511	80.00	1,294,422,487	85.00	1,123,818,145	90.00	1,080,006,071	95.00	1,136,648,295	100.00	1,193,796,925	100.00	6,266,416,434	DKPP	Kota Batam
		3	27	4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	Sampel keswan dan kesmavet adalah specimen yang diambil dari lokasi peternakan dan pasar untuk diuji di Laboraturium Balai Veteriner Bukit tinggi	jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji dalam keadaan Baik dibagi jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji dikali 100%	75	75	60,000,000	80	111,820,500	85	115,667,125	90	119,784,875	95	124,204,937	100	128,961,986	100	660,439,423	DKPP	Kota Batam
		3	27	04	02.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji di Laboratorium	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis seluruh kota Batam	Jumlah Laporan dalam Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis se- Kota Batam dalam 1 tahun	1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	111,820,500	1 Laporan	115,667,125.20	1 Laporan	119,784,874.86	1 Laporan	124,204,936.74	1 Laporan	128,961,985.82	1 Laporan	660,439,423	DKPP	Kota Batam

		3	27	4	02.01		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan	Pelayan terhadap hewan peliharaan dalam mutasi, kesehatan, pencegahan dan pengendalian populasi	Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Lapboraturium di UPTD Puskeswan dalam 1 Tahun Anggaran	950 kali	1,000	299,986,911	1050	1,126,384,837	1125	950,000,000.00	1,200	900,000,000.00	1,275	950,000,000.00	1,350	1,000,000,000.00	1350 kali	5,226,371,748	DKPP	Kota Batam
		3	27	04	02	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sampel untuk diagnosa penyakit hewan dan sampel produk asal hewan (PAH) yang diuji di UPTD. Puskeswan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Pelayanan Jasa Laboraturium berupa pemeriksaan sampel ternak/hewan untuk memenuhi persyaratan Mutasi keluar masuk di Kota Batam	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium di UPTD Puskeswan dalam 1 Tahun Anggaran	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	622,024,000	12 Laporan	600,000,000.00	12 Laporan	500,000,000.00	12 Laporan	500,000,000.00	12 Laporan	500,000,000.00	12 Laporan	2,722,024,000	DKPP	Kota Batam
		3	27	04	02	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang diperiksa/ divaksinasi / diobati dan dilakukan tindakan (treatment) di UPTD. Puskeswan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Medik Veteriner berupa pengobatan Hewan, pencegahan penyakit dan pengendalian populasi Hewan peliharaan	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner di UPTD Puskeswan dalam 1 Tahun Anggaran	12 Laporan	12 Laporan	299,986,911	12 Laporan	504,360,837	12 Laporan	350,000,000.00	12 Laporan	400,000,000.00	12 Laporan	450,000,000.00	12 Laporan	500,000,000.00	12 Laporan	2,504,347,748	DKPP	Kota Batam
		3	27	4	02		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	unit usaha produk asal hewan Kelompok masyarakat yang melakukan usaha pengolahan Pangan asal hewan	jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi dibagi Jumlah Unit Usaha produk asal hewan di Kota Batam dikali 100%	0	15	77,737,600	15	56,217,150	31	58,151,020	46	60,221,196	62	62,443,358	77	64,834,939	77	379,605,264	DKPP	Kota Batam
		3	27	04	02	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	Jumlah Laporan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan unit usaha produk asal hewan Kelompok masyarakat yang melakukan usaha pengolahan Pangan asal hewan agar berjalan sesuai dengan baik dan benar	jumlah Laporan Pendampingan unit usaha produk asal hewan di Kota Batam dalam 1 tahun	0	12 Laporan	77,737,600	12 Laporan	56,217,150	12 Laporan	58,151,019.96	12 Laporan	60,221,196.27	12 Laporan	62,443,358.41	12 Laporan	64,834,939.04	170	379,605,264	DKPP	Kota Batam

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam. Target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kineja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kineja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.2	86.9	87.2	87.6	87.9	88.2	88.5	88.5
1.1	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	-	85	86	87	88	89	90	90
1.2	Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	151.83	152	152.2	152.4	152.6	152.8	153	153
1.3	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	30.300 Ton	3.0	3.5	4	4	4	4	22.5
1.4	Persentase peningkatan produksi ternak sapi	-	8	16	21	18	22	20	20
1.5	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	70%	75	80	85	90	95	100	100

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92.2	86.9	87.2	87.6	87.9	88.2	88.5
Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)		(kg / kapita / tahun)	151.83	152	152.2	152.4	152.6	152.8	153
Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	∑Produksi Tahun N – ∑Produksi Tahun n-1 / Produksi Tahun n-1	%	-	3.0	3.5	4	4	4	4
Persentase peningkatan produksi ternak sapi	∑Produksi Tahun N – ∑Produksi Tahun n-1 / Produksi Tahun n-1	%	-	8	16	21	18	22	20
Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal	Persentase Hasil Lab Negative Ditambah Persentase Lokus Yang Terealisasi Dibagi Dua	%	70	75	80	85	90	95	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021sampai 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Batam.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.

3. Perubahan Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau provinsi, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Raja Haji No. 03 Telp. (0778) 323429 Fax. (0778) 327794
Email : dinas_KP2_KotaBatam@yahoo.com
SEKUPANG - BATAM
Kode Pos : 24922

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 57/SET/DKPP/12/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD untuk periode 5 (Lima) tahun;

b. bahwa untuk menyusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026, perlu membentuk Tim Penyusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RENCANA STRATEGIS Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RENCANA STRATEGIS dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 14 Desember 2020

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BATAM

MARDANIS. S.E. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 198811 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 57/DKPP/12/2020
Tanggal : 14 Desember 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB
3.	KASUB.BAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM	SEKRETARIS
I.	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERTANIAN**	
NO.	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1	Kabid Pertanian	Koordinator
2.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4.	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengawasan Pupuk dan Petisida	Anggota

II.	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG KETAHANAN PANGAN**	
NO.	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1.	Kabid Ketahanan Pangan	Koordinator
2.	Kepala Seksi Bidang Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
3.	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
4.	Kepala Seksi Ketersedian dan Kerawanan Pangan	Anggota
III.	**PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	
NO.	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2.	Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak	Anggota
3.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterine	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Anggota

IV.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN	
NO.	**JABATAN**	**JABATAN DALAM TIM**
1.	Kabid Kelembagaan dan Penyuluh	Koordinator
2.	Kepala Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh	Anggota
3.	Kepala Seksi Penguatan SDM Petani dan Peternak	Anggota
4.	Kepala Seksi Programa Penyuluhan	Anggota

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 14 Desember 2020

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BATAM

MARDANIS. S.E. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 198811 1 003